



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah dapat disusun tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama bagi para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Babakancikao.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Babakancikao dalam melaksanakan tugas lebih kurang 5 (lima) bulan kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian agar dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah pada masa yang akan datang.

Babakancikao, 26 Juli 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
NIP. 19770401 200701 1 009**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum3

 1.3. Maksud dan Tujuan.....5

 1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 20248

 2.1 Capaian Program sampai dengan Triw. II Tahun 20249

 2.2 Evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap RKPD23

 2.3 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program di Kecamatan Babakancikao sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 23

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA 25

BAB IV: PENUTUP 54

DAFTAR LAMPIRAN iii

DAFTAR TABEL iv



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Capaian Kinerja Program Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja.....</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ...</i>	<i>28</i>



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Surat Keputusan Camat Babakancikao tentang Tim Penyusun Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2024.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diawali penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, Kecamatan, sampai ke tingkat Kabupaten. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Hal ini sesuai



amanat ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang antara lain menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 untuk mewujudkan kesesuaian atas adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer. Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 serta pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2024.

Atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan Renja Tahun 2024. Hal yang mendasari untuk perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, adalah:

1. Perkembangan kebutuhan organisasi;
2. Pergeseran subkegiatan / Parsial II tahun berjalan;
3. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
4. Permenkeu Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian indikator program (IKK).
7. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;



8. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
9. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
10. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
11. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);



12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 58);

1.3 Maksud dan Tujuan

Memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada ketentuan Pasal 2, maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Selanjutnya, pada Pasal 3 berkaitan dengan tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;



- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

1.4 Sistematika Penyusunan Renja

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Babakancikao, proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Renja Kecamatan Babakancikao dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Babakancikao, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Babakancikao.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao.



1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel matrik.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga mengenai kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Babakancikao sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Babakancikao sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Babakancikao.

Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Babakancikao tahun 2024 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2024 guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU. 01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;



5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus di evaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya.

2.1 Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan daerah, sejatinya dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dengan menggunakan skala penilaian kinerja

Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada Kecamatan Babakancikao sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program
Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Babakancikao				3,460,825,015		1,844,631,993	60.70	53.30	Rendah
7.01	KECAMATAN				3,460,825,015		1,844,631,993	60.70	53.30	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,211,825,015		1,813,978,993		56.48	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100.00	56.48	Sangat Tinggi

** PERUBAHAN RENJA KECAMATAN
BABAKANCIKAO TAHUN 2024**



7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7	15,868,100	5	11,553,100	71.43	72.81	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,948,500	2	3,593,500	100.00	91.01	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,980,000	1	1,980,000	1	100.00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,980,000	0	-	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,980,000	1	1,980,000		100.00	

***PERUBAHAN RENJA KECAMATAN
BABAKANCIKAO TAHUN 2024***



7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,980,000	0	-	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3,999,600	1	3,999,600	100.00	100.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	3	2,666,924,889	2	1,558,066,491	66.67	58.42	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2,660,023,989	19	1,554,145,591	100.00	58.43	



7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,920,900	1	3,920,900	100.00	100.00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	2,980,000		-		0.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Paket	1	36,640,000	0	-		0.00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	16,640,000	0	-		0.00	



7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20,000,000	0	-		0.00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi umum yang disusun	Paket	43	62,767,646	12	24,961,000	27.91	39.77	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	10,000,000	8	4,516,000	50.00	45.16	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2,292,000		-		0.00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	3,000,000		-		0.00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	39,510,646	2	17,689,000	50.00	44.77	



7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	969,000		-		0.00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1,996,000	1	1,996,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	5,000,000	15	760,000	15.00	15.20	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan	Unit	25	20,970,000	0	-		0.00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	3,000,000	0	-		0.00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8,970,000	0	-		0.00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9,000,000	0	-		0.00	



7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Laporan	19	273,440,280	13	147,434,002	68.42	53.92	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55,299,260	10	25,452,347	83.33	46.03	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	218,141,020	3	121,981,655	42.86	55.92	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan	Unit	45	135,214,100	23	71,964,400	51.11	53.22	



7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	25,000,000	4	11,757,300	40.00	47.03	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	4,880,000	31	4,880,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	105,334,100	0	55,327,100	0.00	52.53	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				125,000,000		11,401,000		9.12	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100.00	9.12	Sangat Tinggi
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Disusun	Dokumen	20	125,000,000		11,401,000		0.00	



7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	125,000,000		11,401,000		9.12	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				30,000,000		19,252,000		64.17	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100.00		64.17		64.17	64.17	Rendah
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang Disusun	Laporan	1	30,000,000	1	19,252,000	0.00	64.17	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	5	20,000,000	5	19,252,000		96.26	



7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10,000,000		-		0.00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10,000,000		-		0.00	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100.00		50.00		50.00	0.00	Sangat Rendah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Disusun	Laporan	4	10,000,000		-		0.00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	10000000		-		0.00	



7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				80,000,000		-		0.00	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100.00		50.00		50.00	0.00	Sangat Rendah
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	80,000,000		-		0.00	



7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Bangsa dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Bangsa dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	410	80,000,000		-		0.00	
-------------------	---	---	-------	-----	------------	--	---	--	------	--



7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				4,000,000		-		0.00	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100.00		0.00		0.00	0.00	Sangat Rendah
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang disusun	Dokumen	2	4,000,000	0	-	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	4,000,000	0	-	0.00	0.00	



2.2 Evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap RKPD

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja diatas (Tabel 2.2), diperoleh data bahwa terdapat 6 indikator program tahun 2024 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2. Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	> 100	MELAMPAUI
2	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
3	76 < 90 %	TINGGI
4	66 < 75 %	SEDANG
5	51 < 65 %	RENDAH
6	< 50 %	SANGAT RENDAH

Sumber Permendagri 86 Tahun 2017

Memperhatikan tabel 2.2 tersebut maka diketahui bahwa hasil evaluasi capaian kinerja indikator program pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta adalah sebesar **60.70%** masih dalam interval nilai kinerja dengan predikat kinerja **Rendah**.

2.3. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program di Kecamatan Babakancikao sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Adanya kegiatan dan subkegiatan yang output dan target belum berkesesuaian;
2. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang kurang mendongkrak dalam pencapaian target kinerja indikator program;
4. Terbatasnya SDM pelaksana kegiatan/subkegiatan di Kecamatan Babakancikao, sehingga pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;



5. Adanya kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti, sehingga berdampak pada penundaan pelaksanaan sebagian kegiatan/subkegiatan;
6. Masih terdapatnya sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, usulan solusi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penyesuaian pagu anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
2. Mengevaluasi kembali output kegiatan/subkegiatan yang kurang sesuai dengan capaian target kinerjanya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja program perangkat daerah;
4. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan/subkegiatan;
5. Penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional;
6. Memprioritaskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan guna menunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

Rencana kerja dan pendanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam Bab III ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024 – 2026.

Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Babakancikao yang digunakan adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan dalam Bab III ini hanya memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Kecamatan Babakancikao adalah Unsur Kewilayahan.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, telah mengakomodir kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan Babakancikao sesuai dengan kewenangan bidang urusan unsur kewilayahan. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan program-program pembangunan untuk melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 berdasarkan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Babakancikao Tahun 2024 - 2026 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertamba h/ Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BABAKANCIKAO					3,236,466, 067.000	3,405,497, 915.000	3,562,028,3 24.000	325,562, 257.000						3,538,32 7,534	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3,236,466, 067.000	3,405,497, 915.000	3,562,028,3 24.000	325,562, 257.000							3,538,32 7,534	
	7.01	KECAMATAN				3,236,466, 067.000	3,405,497, 915.000	3,562,028,3 24.000	325,562, 257.000							3,538,32 7,534	
1.	7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	100 %	100 %	3,151,551, 305.000	3,156,497, 915.000	3,313,028,3 24.000	-- 161,477, 019						100 %	3,315,31 5,567	

***PERUBAHAN RENJA KECAMATAN
BABAKANCIKAO TAHUN 2024***



	7.01. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 Doku men	7 Doku men	16,000,000 .000	15,868,100 .000	15,868,100.0 00	- 131,900.0 00			-	-	-	7 Doku men	18,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Doku men	2 Doku men	4,000,000. 000	3,948,500. 000	3,948,500.00 0	- 51,500.00 0	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		2 Doku men	6,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	1 Doku men	1 Doku men	2,000,000. 000	1,980,000. 000	1,980,000.00 0	- 20,000.00 0	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		1 Doku men	2,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.000	1,980,000.000	1,980,000.000	- 20,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.000	1,980,000.000	1,980,000.000	- 20,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.000	1,980,000.000	1,980,000.000	- 20,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000.000	3,999,600.000	3,999,600.000	-400.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 orang dan 1 Laporan	19 orang dan 1 Laporan	2,717,565,105.000	2,666,924,889.000	2,699,165,698.000	18,399,407.000			-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	19 orang dan 1 Laporan	2,699,264,798	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2,710,565,105.000	2,660,023,989.000	2,692,264,798.000	18,300,307.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA PERIMBANGAN	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		19 Orang/bulan	2,692,264,798	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Lapo ran	1 Lapo ran	4,000,000. 000	3,920,900. 000	3,920,900.00 0	79,100.00 0	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		1 Lapo ran	4,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18 Lapo ran	18 Lapo ran	3,000,000. 000	2,980,000. 000	2,980,000.00 0	20,000.00 0	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		18 Lapo ran	3,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Kinerja ASN Dan Kompetensi ASN</i>	-	1 Paket	9,986,200. 000	36,640,000 .000	36,640,000.0 00	26,653,80 0.000			-	-	-	1 Paket	44,533,21 2	KECAMATAN BABAKAN



	7.01. 01.2. 05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	1 Paket	7,986,200.000	16,640,000.000	16,640,000.000	8,653,800.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	24,533,212	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	1 Orang	1 Orang	2,000,000.000	20,000,000.000	20,000,000.000	18,000,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	20,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah</i>	43 Paket	43 Paket	92,000,000.000	62,767,646.000	62,767,646.000	29,232,354.000			-	-	-	43 Paket	102,454,811	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket	15 Paket	10,000,000 .000	10,000,000 .000	10,000,000.0 00	0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		15 Paket	12,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	3,000,000. 000	2,292,000. 000	2,292,000.00 0	708,000.0 00	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		2 Paket	4,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKA O



	7.01. 01.2. 06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	16 Paket	16 Paket	3,000,000.000	3,000,000.000	3,000,000.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Paket	4,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	68,000,000.000	39,510,646.000	39,510,646.000	28,489,354.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	69,454,811	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	1,000,000. 000	969,000.00 0	969,000.000	31,000.00 0	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -		5 Paket	3,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 06.00 07	Penyediaan Bahan/Material															
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2,000,000. 000	1,996,000. 000	1,996,000.00 0	4,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -		1 Paket	5,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															KECAMATAN BABAKANCIKA O
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Lapo ran	1 Lapo ran	5,000,000. 000	5,000,000. 000	5,000,000.00 0	0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1 Lapo ran	5,000,000	
	7.01. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya Kuantitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>	25 Unit	25 Unit	21,000,000 .000	20,970,000 .000	42,430,300.0 00	21,430,30 0.000			-	- -	-	25 Unit	120,000,0 10	KECAMATA N BABAKANC
	7.01. 01.2. 07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															KECAMATAN BABAKANCIKA O
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	0.000	0.000	0.000	0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1 Unit	10	



	7.01. 01.2. 07.00 05	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	25 Unit	25 Unit	3,000,000.000	3,000,000.000	3,000,000.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	15,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	4 Unit	9,000,000.000	8,970,000.000	30,430,300.000	21,430,300.000	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		4 Unit	10,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	9,000,000.000	9,000,000.000	9,000,000.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	45,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKA
	7.01. 01.2. 07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	-	-	9,000,000.000	9,000,000.000	9,000,000.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.00 Unit	50,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKA
	7.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah</i>	19 Laporan	19 Laporan	255,000,000.000	273,440,280.000	273,440,280.000	18,440,280.000			-	-		19 Laporan	251,062,736	KECAMATAN BABAKANC



	7.01. 01.2. 08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lapo ran	12 Lapo ran	80,000,000 .000	55,299,260 .000	55,299,260.0 00	24,700,74 0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		12 Lapo ran	85,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKA O
	7.01. 01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	7 Lapo ran	7 Lapo ran	175,000,00 0.000	218,141,02 0.000	218,141,020. 000	43,141,02 0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		7 Lapo ran	166,062,7 36	KECAMATAN BABAKANCIKA O
	7.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	45 Unit	45 Unit	40,000,000 .000	79,887,000 .000	182,716,300. 000	142,716,3 00.000			-	- -	-	45 Unit	80,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIK AO



	7.01. 01.2. 09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	10 Unit	25,000,000 .000	25,000,000 .000	25,000,000.0 00	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	25,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	=	=	0.000	0.000	0.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	-	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 01.2. 09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	31 Unit	31 Unit	5,000,000.000	4,880,000.000	4,880,000.000	120,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Unit	5,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 01.2. 09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	10,000,000.000	50,007,000.000	152,836,300.000	142,836,300.000	Kab. Purwakarta, Babakan- cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		1 Unit	50,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %	100 %	10,000,000	125,000,000	125,000,000	10,000,000						100 %	110,250,000	



	7.01. 02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Disusun Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yangDi Susun	2 Doku men	2 Doku men	10,000,000 .000	125,000,00 0.000	125,000,000. 000	115,000,0 00.000			-	10. Refor masi Birok rasi dan Pelay anan Publi k	-	2 Doku men	110,000,0 00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 02.2. 01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Doku men	3 Doku men	10,000,000 .000	125,000,00 0.000	125,000,000. 000	115,000,0 00.000	Kab. Purwaka rta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	10. Refor masi Birok rasi dan Pelay anan Publi k		2 Doku men	110,000,0 00	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 02.2. 03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah unit hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-			-	10. Refor masi Birok rasi dan Pelay anan Publi k	-	1.00 Unit	250,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01. 02.2. 03.00 02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															KECAMATAN BABAKANCIKAO
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	-	-	-	-	-	-	Kab. Purwaka rta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	10. Refor masi Birok rasi dan Pelay anan Publi k		1.00 Unit	250,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
3.	7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %	100 %	22,000,000	30,000,000	30,000,000	22,000,000						100 %	27,761,967	



	7.01. 03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang Disusun</i>	-	1 Lapo ran	22,000,000 .000	30,000,000 .000	30,000,000.0 00	8,000,000 .000			-	- -	-	1 Lapo ran	21,500,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKA O
	7.01. 03.2. 01.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	5 Lemb aga K emas yara k atan	5 Lemb aga K emas yara k atan	17,000,000 .000	20,000,000 .000	20,000,000.0 00	3,000,000 .000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		5 Lemb aga K emas yara k atan	17,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 03.2. 01.00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Lapo ran	1 Lapo ran	5,000,000. 000	10,000,000 .000	10,000,000.0 00	5,000,000 .000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1 Lapo ran	4,500,000	KECAMATAN BABAKANCIKA O
	7.01. 03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	-	-	-	-	-	-			-	- -	-	1 Lapo ran	6,261,967	KECAMATAN BABAKANCIKA O
	7.01. 03.2. 03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1 Lapo ran	6,261,967	KECAMATAN BABAKANCIKA O



4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000						100 %	15,000,000	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000.000	10,000,000.000	10,000,000.000	0.000			-	-	-	4 Laporan	15,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000.000	10,000,000.000	10,000,000.000	0.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	15,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 %	100 %	34,914,762	80,000,000	80,000,000	34,914,762						100 %	60,000,000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan	-	6 Kegiatan	34,914,762.000	80,000,000.000	80,000,000.000	45,085,238.000			-	-	-	5 Kegiatan	60,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															



			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100 Oran g	70 Oran g	34,914,762 .000	80,000,000 .000	80,000,000.0 00	45,085,23 8.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	-		410 Oran g	60,000,00 0	KECAMATAN BABAKANCIKAO
--	--	--	--	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	---	---	--	------------------	----------------	------------------------



6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 %	100 %	8,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000						100 %	10,000,000	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000.000	4,000,000.000	4,000,000.000	- 4,000,000.000			-	-	-	2 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.000	0.000	0.000	4,000,000.000	Kab. Purwakarta, Babakan cikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN BABAKANCIKAO



	7.01. 06.2. 01.00 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															KECAMATAN BABAKANCIKAO
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	1 Doku men	1 Doku men	4,000,000. 000	4,000,000. 000	4,000,000.00 0	0.000	Kab. Purwaka rta, Babaka ncikao, Semua Kel/Des a	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)	-	- -		1 Doku men	5,000,000	
	J U M L A H					3,236,466, 067.000	3,405,497, 915.000	3,562,028,3 24.000	325,562, 257.000							3,538,32 7,534	



BAB IV P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peraturan perundang-undangan baik dari pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dan harus diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Perubahan Renja Tahun 2024 dilakukan juga dalam rangka penyesuaian kemampuan riil keuangan daerah berdasarkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024 dan proyeksi potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2024, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan target pembangunan daerah tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Babakancikao sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Babakancikao menyusun Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Babakancikao demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Babakancikao telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan



dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tahun 2024.

Purwakarta, 26 Juli 2024



**Camat Babakancikao
Kabupaten Purwakarta**

H. Rustaman Arifin, SH.,MM

Pembina/IV-a

Nip. 19770401 200701 1 009



Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

PERUBAHAN RKPD 2024

Kabupaten Purwakarta

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024



**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 47 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyesuaian kemampuan riil keuangan daerah, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024;
- c. pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI Penutup

- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

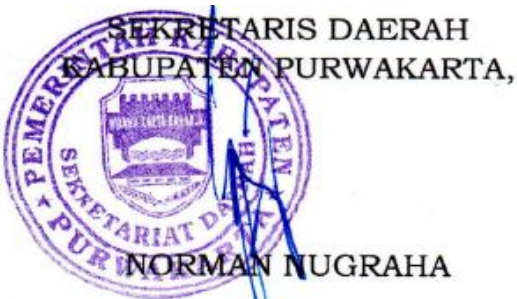
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 47

Tanggal : 26 Juli 2024

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 9
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 11
1.5. Sistematika	I - 12
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	II - 1
2.1. Capaian Program Triwulan II Tahun 2024	II - 2
2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap RPD	II - 68
2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2024	II - 74
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III - 29
3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	III - 30
3.3. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	III - 33
3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024	III - 36
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV - 1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV - 8
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta	IV - 10
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV - 15

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV - 15
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV - 28
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta	IV - 29
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
Bab ini memuat rencana program kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah yang disusun beserta pendanaanya	V - 1
 BAB VI PENUTUP	VI - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-10

Gambar 3.1 Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten
Purwakarta III-18

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 IV-26

Gambar 4.2 Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 IV-27

Gambar 4.3 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP
Tahun 2024 IV-27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-3
Grafik 3.2	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Wilayah Perbatasan.....	III-4
Grafik 3.3	Inflasi Kabupaten Purwakarta.....	III-13
Grafik 3.4	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	III-14
Grafik 3.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta	III-15
Grafik 3.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta.....	III-16
Grafik 3.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta	III-19
Grafik 3.8	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-20
Grafik 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta	III-22
Grafik 3.10	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan.....	III-23
Grafik 3.11	Persandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-23
Grafik 3.12	Indeks Gini Kabupaten Purwakarta	III-24
Grafik 3.13	Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan.....	III-25
Grafik 3.14	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta .	III-26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-3
Tabel 2.2	Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024 Triwulan 2	II-64
Tabel 2.3	Rekap Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan 2 per Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	II-69
Tabel 2.4	Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Triwulan II	II-72
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	III-2
Tabel 3.2	Persandingan Pertumbuhsn Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional Provinsi dan Kab di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023	III-3
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019 - 2023	III-7
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Usaha), Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 - 2023	III-8
Tabel 3.6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019- 2023	III-8
Tabel 3.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-9
Tabel 3.8	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023	III-10
Tabel 3.9	Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-12
Tabel 3.10	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2023	III-14
Tabel 3.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-15

Tabel 3.12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-16
Tabel 3.13	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019 - 2023	III-16
Tabel 3.14	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-19
Tabel 3.15	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023	III-20
Tabel 3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-22
Tabel 3.17	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2023	III-22
Tabel 3.18	Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 - 2023	III-24
Tabel 3.19	Persandingan Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019 - 2024	III-24
Tabel 3.20	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	III-26
Tabel 3.21	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	III-28
Tabel 3.22	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024	III-32
Tabel 3.23	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024	III-35
Tabel 3.24	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	III-36
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.2	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-36
Tabel 4.3	Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2024.....	IV-37

Tabel 4.4	Keselaran Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026	IV-38
Tabel 4.5	Keselaran Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024	IV-39
Tabel 4.6	Keselaran Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	IV-41
Tabel 4.7	Keselaran Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2024	IV-43
Tabel 4.8	Keselaran Arah Kebijakan dan Indikator Sasaran RKP Nasional dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024	IV-44
Tabel 4.9	Keselaran Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024.....	IV-46
Tabel 4.10	Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta	IV-50
Tabel 5.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	V-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Namun demikian memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal kebijakan yang mendasari untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan riil keuangan daerah;
5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- c. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- d. penetapan.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten Purwakarta. Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

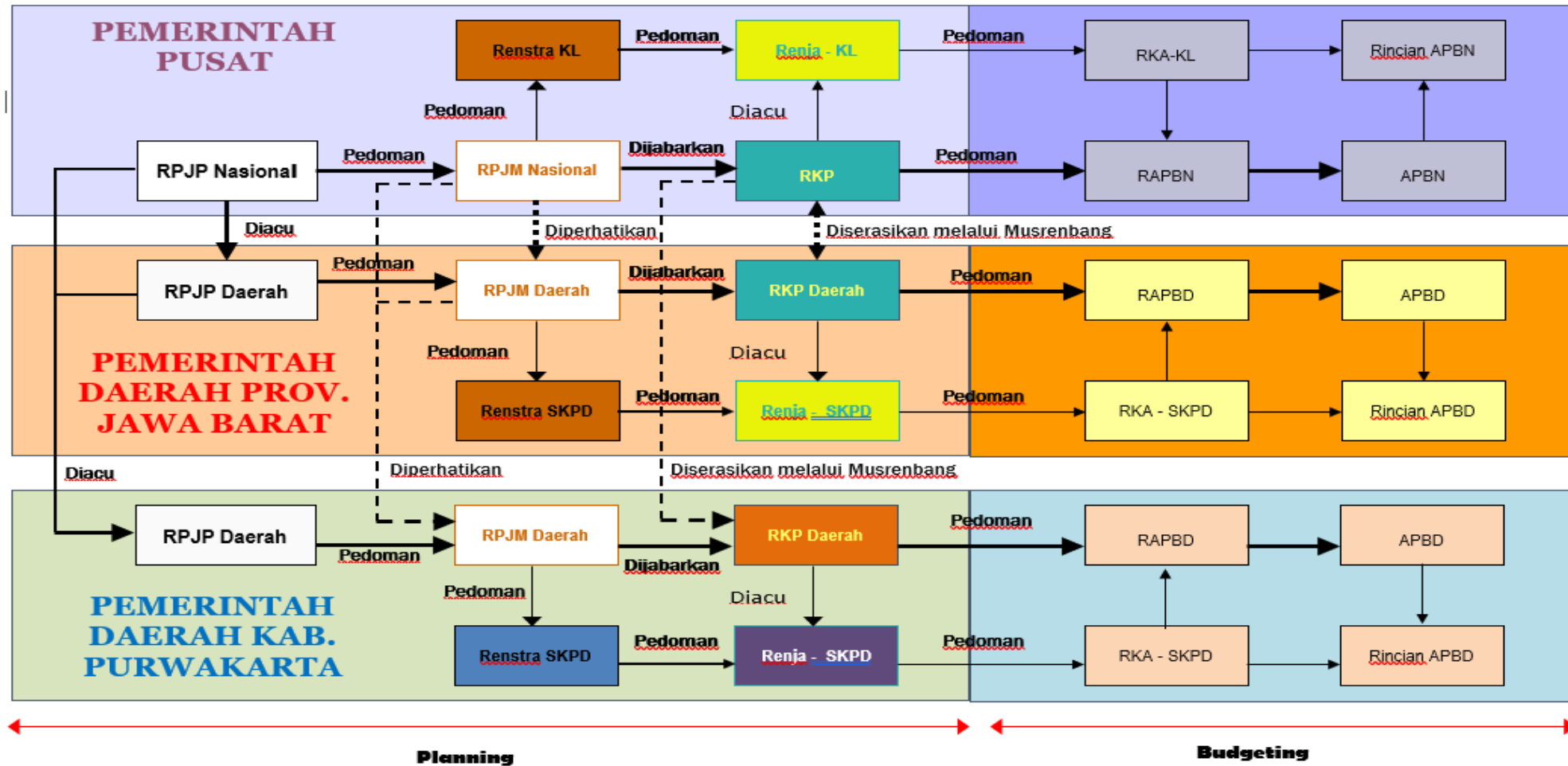
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar. 1.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2024, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan Perubahan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 pada Triwulan II, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi serta Kab. Purwakarta, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun ini.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab. Purwakarta, serta prioritas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kab. Purwakarta. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kab. Purwakarta dengan pembangunan nasional dan Provinsi. Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Pada pelaksanaan RKPD tahun 2024 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2024 guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU. 01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah sampai dengan semester I harus dievaluasi dan diproyeksi ulang sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

2.1. Capaian Program Triwulan II Tahun 2024

Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan daerah, sejatinya dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.

Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH					2.709.858.394.270		1.013.013.265.627	47,76	37,38	Kabupaten Purwakarta	SANGAT RENDAH
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.489.293.410.418		531.328.370.078	63,10	35,68		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				284.919.347.645		105.555.319.167	40,22	37,05		
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				30.541.475.063		9.952.206.768	45,91	32,59		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				165.619.559.078		77.165.070.375	40,03	46,59		
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				570.561.543.411		210.032.469.332	62,27	36,81		
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31.335.945.006		13.598.425.004	50,34	43,40		
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				86.008.136.215		33.001.212.728	48,11	38,37		
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				51.578.977.434		32.380.192.175	32,12	62,78		
1.01.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				714.756.181.859		275.445.170.120	89,58	14,55	Dinas Pendidikan	TINGGI
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				714.756.181.859		275.445.170.120	89,58	14,55	Dinas Pendidikan	
1.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				482.984.573.659		267.847.204.520		55,46	Dinas Pendidikan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
1.01.02	Program : Pengelolaan Pendidikan				230.819.038.200		7.518.485.600		3,26	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	74,29		60,42		81,33		Dinas Pendidikan	TINGGI
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,50		99,61		100,11		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,33		84,27		89,34		Dinas Pendidikan	TINGGI
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,54		12,02		4,49		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi	Persen	100,00		99,37		99,37		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dalam pendidikan dasar									
		Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,50		12,02		4,16		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	1,75		2,25		128,57		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100,00		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDAH
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100,00		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDAH
		Angka partisipasi kasar	Persen	24,30		60,42		248,64		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Angka Partisipasi Murni	Persen	22,80		60,42		265,00		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,61		99,61		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	84,00		84,27		100,32		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,50		99,61		100,11		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,30		84,27		89,36		Dinas Pendidikan	TINGGI
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,50		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,70		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	24,19		24,19		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	44,88		44,88		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,55		41,55		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00		98,13		98,13		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,10		60,42		102,24		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,86		99,61		100,76		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	7,93		12,02		151,58		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	52,54		79,15		150,65		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	40,77		73,34		179,87		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	60,83		70,98		116,70		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,33		67,78		127,09		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	43,50		40,67		93,49		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	21,63		67,10		310,25		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	81,68		78,59		96,22		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	79,27		74,57		94,07		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Indeks Inklusivitas SD	nilai	75,66		59,99		79,29		Dinas Pendidikan	TINGGI
		Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	78,41		71,76		91,52		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	69,95		73,15		104,57		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI
		Indeks Inklusivitas SMP	nilai	70,31		57,43		81,69		Dinas Pendidikan	TINGGI
1.01.03	Program : Pengembangan Kurikulum				346.000.000		71.000.000		20,52	Dinas Pendidikan	
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00		48,63		48,63		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.04	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				200.000.000		0		0,00	Dinas Pendidikan	
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	38,77		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	41,80		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,06		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
1.01.05	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan				99.320.000		7.780.000		7,83	Dinas Pendidikan	
		Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
		Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
1.01.06	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra				307.250.000		700.000		0,23	Dinas Pendidikan	
		Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH
1.02.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KESEHATAN				237.686.073.189		45.645.114.136	67,65	21,34	Dinas Kesehatan	SEDANG
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				237.686.073.189		45.645.114.136	67,65	21,34	Dinas Kesehatan	
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				109.544.610.449		35.211.795.675		32,14	Dinas Kesehatan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		BB		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				114.025.181.740		4.281.919.081		3,76	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	50,00		100,00		200,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00		34,19		34,19		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00		36,53		36,53		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00		38,45		38,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00		32,95		32,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		60,89		60,89		Dinas Kesehatan	RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		38,02		38,02		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		35,80		35,80		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80,00		45,95		57,44		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		41,89		41,89		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00		67,83		67,83		Dinas Kesehatan	SEDANG
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	95,00		58,62		61,71		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80,00		39,30		49,13		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		34,19		34,19		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		36,53		36,53		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		38,45		38,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		32,95		32,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		60,89		60,89		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		41,08		41,08		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		49,20		49,20		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		45,95		45,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		41,89		41,89		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		67,83		67,83		Dinas Kesehatan	SEDANG
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang	Persen	95,00		58,62		61,71		Dinas Kesehatan	RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mendapatkan pelayanan kesehatan									
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	80,00		52,00		65,00		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Rasio posyandu per satuan balita	Poin	17,34		14,83		85,52		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,00		40,66		40,66		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00		37,01		37,01		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00		15,62		15,62		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00		88,89		88,89		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100,00		35,12		35,12		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	70,00		37,57		53,67		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	90,00		56,52		62,80		Dinas Kesehatan	RENDAH
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	245,65		58,74		23,91		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	2,58		2,47		104,45		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	90,00		69,83		77,59		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	90,00		75,45		83,83		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00		83,86		83,86		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Penderita diare yang ditangani	Persen	85,00		36,49		42,93		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	100,00		25,00		25,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki	Persen	80,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS									RENDAH
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00		43,56		43,56		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan puskesmas	Persen	100,00		117,65		117,65		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,00		36,53		36,53		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,00		30,10		30,10		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100,00		32,95		32,95		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				13.064.577.000		6.009.524.380		46,00	Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	30,00		75,00		250,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	30,00		65,40		218,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	30,00		48,78		162,60		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	30,00		71,86		239,53		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30,00		45,00		150,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30,00		34,90		116,33		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				590.444.000		125.395.000		21,24	Dinas Kesehatan	
		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00		78,53		78,53		Dinas Kesehatan	TINGGI
		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	80,00		78,53		98,16		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				461.260.000		16.480.000		3,57	Dinas Kesehatan	
		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	6,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	89,00		33,33		37,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH
1.02.0.00.0.0 0.02.0000	RSUD BAYU ASIH				204.061.620.297		100.011.539.441	96,21	12,61	RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				204.061.620.297		100.011.539.441	96,21	12,61	RSUD Bayu Asih	
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				198.223.608.453		100.011.539.441		50,45	RSUD Bayu Asih	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Rasio Keuangan BLUD	Skor	80,00		236,30		295,38		RSUD Bayu Asih	MELAMPAUI
		Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD	Persen	100,00		94,00		94,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	80,00		100,00		125,00		RSUD Bayu Asih	MELAMPAUI
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				5.838.011.844		0		0,00	RSUD Bayu Asih	
		Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Capaian Indikator Medik	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Pengendalian Mutu	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
		Temuan Yang di Tindaklanjuti	Persen	80,00		100,00		125,00		RSUD Bayu Asih	MELAMPAUI
		Tingkat Kehandalan Sumber Daya	Persen	80,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0,00	RSUD Bayu Asih	
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	75,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	75,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				0		0		0,00	RSUD Bayu Asih	
		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	75,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH
1.03.2.10.0.0 0.02.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				175.965.176.236		58.895.509.491	28,86	23,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				175.965.176.236		58.895.509.491	28,86	23,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				32.177.069.737		10.819.518.368		33,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT TINGGI
1.03.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				24.747.103.300		5.556.810.075		22,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,60		8,44		22,45		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	84,71		19,02		22,45		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				2.657.896.700		369.531.000		13,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25,00		3,48		13,90		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.08	Program : Penataan Bangunan Gedung				23.003.149.302		9.181.358.480		39,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00		39,91		39,91		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen	10,00		3,99		39,91		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	90,00		35,92		39,91		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.09	Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				1.141.630.400		197.169.400		17,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen	1,00		0,17		17,30		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.10	Program : Penyelenggaraan Jalan				86.997.106.499		31.781.796.778		36,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,00		30,69		36,54		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,00		24,84		36,53		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	72,00		26,30		36,53		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	7,00		2,56		36,53		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	5,00		1,83		36,52		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.11	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi				790.121.298		9.951.000		1,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25,00		0,32		1,26		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,10		0,00		1,26		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	50,00		0,63		1,26		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03.12	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang				4.451.099.000		979.374.390		22,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	20,00		4,40		22,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	55,00		12,10		22,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
		Ketaatan terhadap RTRW	Persen	50,00		11,00		22,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				0		0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2.10.04	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				0		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	10,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
2.10.05	Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				0		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	100,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
2.10.08	Program : Pengelolaan Tanah Kosong				0		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	25,00		0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.04.1.03.0.0 0.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				99.532.728.892		27.594.227.594	128,19	36,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	MELAMPAUI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				36.375.849.657		5.943.534.910	55,81	15,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.03	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				20.789.935.039		4.482.470.292		21,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	61,00		31,00		50,82		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	95,00		26,00		27,37		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	80,00		33,00		41,25		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Persen	1,00		1,00		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT TINGGI
		Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	97,00		36,00		37,11		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
1.03.05	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				12.735.569.071		409.769.071		3,22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	69,00		26,00		37,68		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	82,00		26,00		31,71		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	1,00		1,00		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT TINGGI
		Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	81,00		26,00		32,10		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				2.850.345.547		1.051.295.547		36,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	2,00		1,00		50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
1.03.07	Program : Pengembangan Permukiman				0		0		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase areal kawasan kumuh	Persen	8,00		6,00		75,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	30,00		26,00		86,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				63.156.879.235		21.650.692.684	72,38	21,51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				17.315.370.175		7.144.166.814		41,26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT TINGGI
1.04.02	Program : Pengembangan Perumahan				392.500.000		2.385.000		0,61	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	38,00		29,00		76,32		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	9,00		11,00		122,22		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	MELAMPAUI
		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	48,00		26,00		54,17		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH
1.04.03	Program : Kawasan Permukiman				37.941.594.060		13.947.318.870		36,76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Rasio rumah layak huni	Persen	8,00		6,00		75,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG
		Rasio permukiman layak huni	Persen	30,00		26,00		86,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96,00		29,00		30,21		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	92,00		27,00		29,35		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH
		Persentase pemukiman yang tertata	Persen	18,00		16,00		88,89		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI
1.04.05	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)				7.507.415.000		556.822.000		7,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00		2,00		66,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00		2,00		66,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG
1.05.0.00.0.0 0.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				22.946.468.066		10.951.771.053	52,00	41,28	Satuan Polisi Pamong Praja	RENDAH
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				22.946.468.066		10.951.771.053	52,00	41,28	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20.017.633.066		9.996.641.031		49,94	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT TINGGI
1.05.02	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				2.928.835.000		955.130.022		32,61	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00		61,00		61,00		Satuan Polisi Pamong Praja	RENDAH
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00		42,00		42,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	100,00		25,00		25,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100,00		50,00		50,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100,00		61,00		61,00		Satuan Polisi Pamong Praja	RENDAH
		Persentase Penegakan PERDA	Persen	100,00		25,00		25,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH
1.05.0.00.0.0 0.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.640.356.796		2.078.682.833	58,40	26,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RENDAH
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.640.356.796		2.078.682.833	58,40	26,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.126.283.980		1.805.761.833		35,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI
1.05.03	Program : Penanggulangan Bencana				1.514.072.816		272.921.000		18,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00		15,30		15,30		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00		22,29		22,29		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00		96,00		96,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI
1.05.0.00.0.0 0.04.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				16.890.749.232		6.969.923.366	83,78	34,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.890.749.232		6.969.923.366	83,78	34,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.309.270.452		6.323.090.166		44,19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
1.05.04	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				2.581.478.780		646.833.200		25,06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00		92,99		92,99		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14		5,5		30,32		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT RENDAH
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100,00		89,83		89,83		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	100,00		89,83		89,83		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Layanan	800,00		538,00		67,25		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SEDANG
1.06.2.08.0.0 0.01.0000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.631.774.351		3.875.811.044	49,01	28,46	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.814.055.851		3.736.432.044	26,35	19,84	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.016.379.432		2.913.398.244		36,34	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		A		128,57		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	MELAMPAUI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Perlindungan Anak	
1.06.02	Program : Pemberdayaan Sosial				245.880.800		28.060.800		11,41	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00		25,00		25,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06.03	Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				0		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	100,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06.04	Program : Rehabilitasi Sosial				615.283.000		204.300.000		33,20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100,00		5,00		5,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06.05	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial				1.539.304.500		545.608.000		35,45	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06.06	Program : Penanganan Bencana				203.981.500		31.171.000		15,28	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		11,22		11,22		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00		24,54		24,54		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
1.06.07	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				193.226.619		13.894.000		7,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00		7,19		7,19		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				817.718.500		139.379.000	22,66	8,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02	Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				260.000.500		60.629.000		23,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Perlindungan Anak	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00		33,30		33,30		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00		35,30		35,30		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00		66,37		66,37		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SEDANG
		Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00		64,00		64,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RENDAH
		Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00		51,00		51,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RENDAH
2.08.03	Program : Perlindungan Perempuan				276.968.000		78.750.000		28,43	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	30,00		0,28		0,95		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00		3,00		3,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100,00		1,00		1,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08.04	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga				120.000.000		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	100,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08.05	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				40.000.000		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Data Gender Anak	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)				120.750.000		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08.07	Program : Perlindungan Khusus Anak				0		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00		15,00		15,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.07.3.32.0.0 0.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				13.694.756.576		4.751.361.416	38,57	71,83	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.269.756.576		4.710.837.416	18,57	35,75	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2.07.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.798.506.576		4.028.908.916		37,31	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT TINGGI
2.07.03	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				1.645.000.000		312.420.000		18,99	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	69,06		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,40		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	3,40		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,57		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,11		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,07		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
2.07.04	Program : Penempatan Tenaga Kerja				456.250.000		257.370.000		56,41	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	5,81		0,55		9,47		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
2.07.05	Program : Hubungan Industrial				370.000.000		112.138.500		30,31	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	50,00		66,00		132,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,64		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	38,88		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Keselamatan dan perlindungan	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				425.000.000		40.524.000	20,00	36,07	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
3.32.02	Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi				0		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
3.32.03	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi				418.880.000		34.404.000		8,21	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Persentase transmigran swakarsa	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
		Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
3.32.04	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi				6.120.000		6.120.000		100,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT TINGGI
2.09.3.27.0.0 0.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				29.012.193.717		8.051.917.330	55,49	45,08	Dinas Pangan dan Pertanian	RENDAH
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				19.672.193.717		7.355.233.330	30,50	20,35	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				18.249.693.717		7.211.845.830		39,52	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Dinas Pangan dan Pertanian	MELAMPAUI
2.09.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				130.000.000		4.600.000		3,54	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
2.09.03	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				1.057.500.000		45.698.500		4,32	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100,00		40,00		40,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
2.09.04	Program : Penanganan Kerawanan Pangan				60.000.000		1.090.000		1,82	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
2.09.05	Program : Pengawasan Keamanan Pangan				175.000.000		91.999.000		52,57	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.340.000.000		696.684.000	24,99	24,72	Dinas Pangan dan Pertanian	
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				2.325.000.000		364.124.000		15,66	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,25		5,70		91,20		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT TINGGI
		Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	2,00		0,50		25,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
		Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	73,00		30,00		41,10		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produksi Padi	Ton	270.808,00		133.320,00		49,23		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
		Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	3,00		1,00		33,33		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
		Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	77,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
		Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	5,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				6.160.000.000		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	48,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27.05	Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				250.000.000		220.140.000		88,06	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	50,00		30,00		60,00		Dinas Pangan dan Pertanian	RENDAH
		Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27.06	Program : Perizinan Usaha Pertanian				40.000.000		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	75,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian				565.000.000		112.420.000		19,90	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Cakupan bina kelompok petani	Persen	73,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
2.11.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				44.771.469.821		18.745.808.896	55,40	21,43	Dinas Lingkungan Hidup	RENDAH
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				44.771.469.821		18.745.808.896	55,40	21,43	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				38.012.283.527		17.665.506.354		46,47	Dinas Lingkungan Hidup	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI
2.11.02	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup				425.000.000		256.500.000		60,35	Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	1,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.03	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				2.495.000.000		312.323.000		12,52	Dinas Lingkungan Hidup	
		Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	70,00		60,00		85,71		Dinas Lingkungan Hidup	TINGGI
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/ Kategori	60,00		60,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/ Kategori	70,00		75,00		107,14		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/ Kategori	37,18		50,00		134,48		Dinas Lingkungan Hidup	MELAMPAUI
2.11.04	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				42.500.000		19.349.000		45,53	Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				0		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	15.000.000.000,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				242.500.000		12.605.600		5,20	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00		25,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00		25,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00		5,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.07	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan				87.500.000		5.686.000		6,50	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH										
		Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Penetapan hak MHA	MHA	1,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.08	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				275.000.000		42.214.000		15,35	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00		25,00		25,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
2.11.09	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				62.500.000		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00		1,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI
		Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.10	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100.000.000		30.570.000		30,57	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH
2.11.11	Program : Pengelolaan Persampahan				3.029.186.294		401.054.942		13,24	Dinas Lingkungan Hidup	
		Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75,00		50,00		66,67		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	31,00		20,00		64,52		Dinas Lingkungan Hidup	RENDAH
		Persentase cakupan area pelayanan	Persen	75,00		60,00		80,00		Dinas Lingkungan Hidup	TINGGI
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	72,00		50,00		69,44		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG
		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00		50,00		66,67		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19.247.960.689		9.283.898.059	93,95	47,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19.247.960.689		9.283.898.059	93,95	47,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				17.928.299.689		8.586.682.559		47,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk				209.501.000		17.014.400		8,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Perekaman KTP elektronik	Persen	100,00		100,91		100,91		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAMPAUI
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	100,00		99,88		99,88		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah		Sudah		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00		99,88		99,88		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50,00		53,06		106,12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAMPAUI
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil				50.160.000		8.350.000		16,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00		89,59		89,59		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI
		Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00		89,59		89,59		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI
		Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100,00		89,59		89,59		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.035.000.000		646.851.100		62,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	55,00		28,50		51,82		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENDAH
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan				25.000.000		25.000.000		100,00	Dinas Kependudukan dan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pencatatan Sipil	
		Profil data kependudukan	Dokumen	1,00		1,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
2.13.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				22.283.734.005		7.372.804.965	86,04	28,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TINGGI
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				22.283.734.005		7.372.804.965	86,04	28,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.353.189.271		4.702.593.874		41,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
2.13.02	Program : Penataan Desa				125.000.000		30.244.500		24,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	30,00		24,02		80,07		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TINGGI
2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa				4.341.453.315		1.946.388.991		44,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	5,00		2,78		55,60		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH
		Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2,00		2,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI
2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa				1.965.520.600		494.441.000		25,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5,00		41,67		833,40		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
		Persentase desa tertib administrasi	Persen	40,00		10,00		25,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	40,00		10,00		25,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase penertiban aset desa	Persen	50,00		10,00		20,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase kepala desa yang dibina	Persen	40,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	45,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.05	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				4.498.570.819		199.136.600		4,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100,00		25,00		25,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase LSM aktif	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase PKK aktif	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Persentase Posyandu aktif	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	5,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH
2.14.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				23.266.501.469		3.573.133.760	32,77	12,20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				23.266.501.469		3.573.133.760	32,77	12,20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.303.441.469		3.119.481.760		37,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
2.14.02	Program : Pengendalian Penduduk				356.000.000		19.500.000		5,48	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,50		2,33		93,20		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00		25,00		25,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	36,00		2,33		6,47		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Berencana	
		Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	30,00		2,50		8,33		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
2.14.03	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				8.843.660.000		296.726.000		3,36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	99,00		17,50		17,68		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	35,22		8,00		22,71		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00		25,00		26,60		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Ratio Akseptor KB	Persen	25.521,00		18,87		0,07		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	83,28		17,50		21,01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71		6,01		23,38		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	534,83		8,01		1,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	46,24		6,27		13,56		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,78		2,60		14,62		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	691.167,00		23,75		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	161.153,00		16,25		0,01		Dinas Pengendalian	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Penduduk dan Keluarga Berencana	RENDAH
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	624.471,00		2,82		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	100,00		7,50		7,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	100,00		133,83		133,83		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	MELAMPAUI
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	126,00		25,00		19,84		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	23,90		12,05		50,42		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RENDAH
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00		1:1,6		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	272.476,00		25,00		0,01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	135,00		43,25		32,04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
2.14.04	Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				5.763.400.000		137.426.000		2,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65		12,05		77,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TINGGI
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00		25,00		0,75		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00		0,00		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65		25,00		159,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	MELAMPAUI
		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71		15,00		27,93		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00		19,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI
2.15.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				43.862.873.684		19.157.079.165	123,27	30,68	Dinas Perhubungan	MELAMPAUI
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				43.862.873.684		19.157.079.165	123,27	30,68	Dinas Perhubungan	
2.15.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				35.371.564.844		17.023.145.291		48,13	Dinas Perhubungan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI
2.15.02	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				8.223.563.840		2.084.205.874		25,34	Dinas Perhubungan	
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	98,00		0,96		0,98		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	80,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Rasio ijin trayek	Persen	50,00		0,03		0,05		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	307,00		2.049,00		667,43		Dinas Perhubungan	MELAMPAUI
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00		1,00		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00		3,00		0,21		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	881,00		98,29		11,16		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Pemasangan Rambu- rambu	Persen	70,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002		0,002		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00		4.227.552,00		733,62		Dinas Perhubungan	MELAMPAUI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	539.548,00		66.343,00		12,30		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
2.15.03	Program : Pengelolaan Pelayaran				267.745.000		49.728.000		18,57	Dinas Perhubungan	
		Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen	30,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH
2.16.2.20.2.2 1.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				26.849.232.106		5.506.910.390	73,28	53,48	Dinas Komunikasi dan Informatika	SEDANG
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.733.120.106		5.138.052.890	28,98	19,38	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.042.665.506		2.917.689.442		22,37	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Dinas Komunikasi dan Informatika	MELAMPAUI
2.16.02	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik				4.653.233.500		578.041.650		12,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	95,00		25,53		26,87		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	95,00		13,08		13,77		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	95,00		19,53		20,56		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100,00		9,39		9,39		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	95,00		14,12		14,86		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.16.03	Program : Aplikasi Informatika				7.037.221.100		1.642.321.798		23,34	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00		23,77		23,77		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	90,00		35,22		39,13		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				912.250.000		130.325.000	17,94	14,29	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral				912.250.000		130.325.000		14,29	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	85,00		19,78		23,27		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	85,00		49,92		58,73		Dinas Komunikasi dan Informatika	RENDAH
		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	Ada		Tidak Ada		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada)	Buku	Ada		Tidak Ada		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	85,00		6,56		7,72		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.203.862.000		238.532.500	26,35	19,81	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				1.203.862.000		238.532.500		19,81	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	30,00		12,12		40,40		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00		38,66		38,66		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
		Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	10,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.17.3.30.3.3 1.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				19.126.886.478		7.769.357.549	103,32	70,77	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	MELAMPAUI
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.124.200.678		7.044.574.749	21,63	14,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				15.010.452.572		6.953.384.649		46,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
2.17.02	Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				50.000.000		16.811.500		33,62	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	87,50		2,86		3,27		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.17.03	Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				125.000.000		660.000		0,53	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,70		49,90		55,63		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	RENDAH
2.17.04	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				200.000.000		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,70		15,45		17,22		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	12,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.17.05	Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				189.707.600		17.869.500		9,42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	72,82		11,24		15,44		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.17.07	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				1.060.882.816		9.270.500		0,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	85,23		9,21		10,81		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Perindustrian	
		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	56,46		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	75,23		8,41		11,18		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	2,53		1,71		67,59		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SEDANG
		Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	57,90		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.17.08	Program : Pengembangan UMKM				488.157.690		46.578.600		9,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	20,56		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	9,63		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				952.772.800		273.118.800	35,20	22,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.02	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				129.437.400		52.819.400		40,81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	95,32		31,89		33,46		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00		40,00		40,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.30.03	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				20.000.000		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
3.30.04		Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			259.545.400		65.380.500		25,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	37,00		21,50		58,11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	RENDAH
3.30.05		Program : Pengembangan Ekspor			178.790.000		49.900.000		27,91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Tingkat Nilai Export bersih	Persen	1,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	2,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.30.06		Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			275.000.000		105.018.900		38,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	64,62		13,20		20,43		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.30.07		Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			90.000.000		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.049.913.000		451.664.000	46,50	34,42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri				849.953.000		425.050.000		50,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	60,00		40,00		66,67		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SEDANG
		Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	83,33		47,46		56,95		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	RENDAH
3.31.03	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				49.974.000		26.614.000		53,26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	20,71		4,84		23,37		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00		100,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		25,00		25,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.31.04	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				149.986.000		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00		1,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Perindustrian	
		Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.18.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				14.699.308.112		6.350.358.801	77,13	23,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TINGGI
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				14.699.308.112		6.350.358.801	77,13	23,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.422.110.853		6.165.568.171		45,94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		AA		111,11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI
2.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal				209.933.259		102.911.250		49,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	5,60		3,00		53,57		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RENDAH
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	6,73		3,56		52,90		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RENDAH
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	730,00		425,00		58,22		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RENDAH
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	28,50		20,00		70,18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SEDANG
2.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal				177.500.000		1.452.000		0,82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2,00		2,00		100,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI
		Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	7,40		6,30		85,14		Dinas Penanaman Modal	TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal				135.000.000		15.177.380		11,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	18,50		12,00		64,86		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RENDAH
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	94,58		100,00		105,73		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92,50		96,05		103,84		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI
2.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				585.147.000		13.443.000		2,30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	7,14		5,00		70,03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SEDANG
2.18.06	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				169.617.000		51.807.000		30,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00		50,00		50,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH
2.19.2.22.3.2 6.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				28.630.705.312		12.014.677.701	89,37	78,79	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	TINGGI
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				25.076.955.312		10.898.246.701	46,25	33,06	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	
2.19.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				16.946.955.312		7.114.186.701		41,98	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.02	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				1.112.500.000		450.110.000		40,46	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0001		0,00		40,46		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,01		0,00		40,46		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,41		0,17		40,46		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,74		0,30		40,46		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,41		0,17		40,46		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.19.03	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				6.692.500.000		3.333.950.000		49,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Tingkat prestasi olahraga	Persen	70,00		34,87		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	50,00		24,91		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	40,00		19,93		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	40,00		19,93		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat atlet berprestasi	Persen	50,00		24,91		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	16,00		7,97		49,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.04	Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				325.000.000		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.551.250.000		414.740.000	10,41	6,76	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.02	Program : Pengembangan Kebudayaan				1.226.250.000		414.740.000		33,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	70,00		23,68		33,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen	55,00		18,60		33,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00		10,15		33,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	30,00		10,15		33,82		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22.03	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional				50.000.000		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	12,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22.04	Program : Pembinaan Sejarah				50.000.000		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22.05	Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				100.000.000		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	60,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	12,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22.06	Program : Pengelolaan Permuseuman				125.000.000		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.002.500.000		701.691.000	32,71	38,96	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
3.26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				908.250.000		287.153.000		31,62	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	6,53		2,06		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	0,42		0,13		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat hunian akomodasi	Persen	19,87		6,28		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kunjungan wisata	Persen	80,00		25,29		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50		0,47		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	0,31		0,10		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	0,43		0,14		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	0,31		0,10		31,62		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
3.26.03	Program : Pemasaran Pariwisata				453.750.000		69.970.000		15,42	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	2,00		0,31		15,42		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
		Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,32		0,05		15,42		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
3.26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				311.250.000		235.658.000		75,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen	1,00		0,76		75,71		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	TINGGI
3.26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				329.250.000		108.910.000		33,08	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	1,00		0,33		33,08		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.23.2.24.0.0 0.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				12.426.192.976		5.002.313.935	32,17	45,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				11.964.565.976		4.802.649.191	9,38	24,11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.385.239.976		4.734.123.191		41,58	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAMPAUI
2.23.02	Program : Pembinaan Perpustakaan				549.326.000		62.731.000		11,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	70,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	70,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	10,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Laju pengunjung perpustakaan	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	75.000,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,80		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,16		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Laju Anggota Perpustakaan	Persen	51,52		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,09		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
2.23.03	Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				30.000.000		5.795.000		19,32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	50,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				461.627.000		199.664.744	22,80	21,63	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02	Program : Pengelolaan Arsip				461.627.000		199.664.744		43,25	Dinas Kearsipan dan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Perpustakaan	
		Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	39,10		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Persentase Penyusutan Arsip	Persen	20,00		12,07		60,35		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH
		Arsip Aktif	Persen	20,00		12,00		60,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH
		Arsip Inaktif	Persen	20,00		20,00		100,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT TINGGI
		Arsip Vital	Persen	20,00		10,64		53,20		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	75,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Persen	4,70		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
2.24.03	Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip				0		0		0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	100,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
		Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
3.25.3.27.0.0 0.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN				16.771.289.263		7.788.524.968	161,96	56,28	Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAUI
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.482.869.614		7.116.672.768	98,61	23,24	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.25.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.136.252.914		7.040.242.768		53,59	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.03	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap				297.145.500		27.714.000		9,33	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.635,30		723,00		44,21		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Produksi perikanan	Persen	5,25		5,32		101,33		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAUI
		Konsumsi ikan	Persen	30,00		30,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
		Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	18,97		12,00		63,26		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Laju Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	3,32		3,00		90,36		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	76,85		60,00		78,07		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
		Produksi Perikanan Tangkap	Persen	3,50		24,78		708,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAUI
3.25.04	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya				777.196.000		31.490.000		4,05	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16.351,74		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	17.987,00		54.115,00		300,86		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAUI
		Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	1.078.038.512,00		572.800.000,00		53,13		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	8.100.000,00		3.730.000,00		46,05		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Produksi Ikan Hias	Ekor	608.990,00		271.690,00		44,61		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Produksi Perikanan budidaya	Ton	36,00		25,42		70,61		Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00		55,00		55,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
3.25.05	Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				26.652.000		12.626.000		47,37	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha	Dokumen	1,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perikanan Budidaya yang diawasi								Peternakan	RENDAH
		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00		40,00		40,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
3.25.06	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				245.623.200		4.600.000		1,87	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	400,00		100,00		25,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	14,00		4,00		28,57		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	130,00		30,00		23,08		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.288.419.649		671.852.200	63,35	33,03	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				1.113.688.149		432.085.000		38,80	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50		0,90		60,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Cakupan Akseptor IB	Persen	75,00		45,00		60,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	10,00		6,00		60,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	2,00		1,00		50,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				165.000.000		86.128.000		52,20	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00		45,00		45,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
3.27.04	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				859.731.500		111.371.200		12,95	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00		0,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
		Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00		64,00		91,43		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
		Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan	Kasus	0,00		0,00		100,00		Dinas Perikanan dan	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zoonosis (PHMSZ)								Peternakan	
		Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00		14,00		82,35		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
		Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	20.000,00		12.280,00		61,40		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	79,00		42,85		54,24		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
		Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	828,00		659,00		79,59		Dinas Perikanan dan Peternakan	TINGGI
		Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	16,20		8,10		50,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
		Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	38,80		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian				150.000.000		42.268.000		28,18	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	16,00		9,00		56,25		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
4.01.5.06.0.0 0.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				81.509.043.594		28.257.265.098	39,11	28,16	Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				81.416.093.594		28.257.265.098	39,11	28,16	Sekretariat Daerah	
4.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum				59.474.453.375		24.254.573.630		40,78	Sekretariat Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Sekretariat Daerah	SANGAT TINGGI
		Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00		3,64		3,64		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00		27,65		27,65		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
4.01.02	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				16.954.410.174		2.583.637.262		15,24	Sekretariat Daerah	
		Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	100,00		10,00		10,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		11,02		11,02		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	100,00		90,00		90,00		Sekretariat Daerah	TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00		10,00		66,67		Sekretariat Daerah	SEDANG
4.01.03	Program : Perekonomian Dan Pembangunan				4.987.230.045		1.419.054.206		28,45	Sekretariat Daerah	
		Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00		1,00		1,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00		1,00		1,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00		4,00		50,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100,00		89,00		89,00		Sekretariat Daerah	TINGGI
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00		53,00		53,00		Sekretariat Daerah	RENDAH
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55,00		3,00		5,45		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN				92.950.000		0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	
5.06.02	Program : Pengelolaan Perbatasan				92.950.000		0		0,00	Sekretariat Daerah	
		Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00		0,00		0,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
4.02.0.00.0.0 0.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				84.203.465.484		48.907.805.277	40,94	57,88	Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH
4.02	SEKRETARIAT DPRD				84.203.465.484		48.907.805.277	40,94	57,88	Sekretariat DPRD	
4.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota				48.758.540.268		28.857.026.939		59,18	Sekretariat DPRD	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		BB		114,29		Sekretariat DPRD	MELAMPAUI
		Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00		59,18		59,18		Sekretariat DPRD	RENDAH
4.02.02	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				35.444.925.216		20.050.778.338		56,57	Sekretariat DPRD	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		56,57		0,00		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH
		Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		56,57		0,00		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		56,57		0,00		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH
		Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00		56,57		56,57		Sekretariat DPRD	RENDAH
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00		56,57		56,57		Sekretariat DPRD	RENDAH
5.01.5.05.0.0 0.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				15.893.593.427		6.168.601.238	48,17	40,94	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
5.01	PERENCANAAN				15.044.843.427		6.151.949.178	48,17	38,98	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12.023.737.786		5.021.776.276		41,77	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA		AA		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI
5.01.02	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.483.605.641		702.433.250		47,35	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Tidak Ada		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI
		Capaian Kinerja RKPD	Persen	89,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RENDAH
5.01.03	Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.537.500.000		427.739.652		27,82	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00		30,32		30,32		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00		7,47		7,47		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00		43,89		43,89		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				848.750.000		16.652.060	0,00	1,96	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.05.02	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah				848.750.000		16.652.060		1,96	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	10,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	42,55		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
5.02.0.00.0.0 0.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				481.132.722.341		178.828.184.346	105,60	24,37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
5.02	KEUANGAN				481.132.722.341		178.828.184.346	105,60	24,37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				94.236.919.785		19.994.158.001		21,22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
5.02.02	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah				384.869.795.556		158.617.866.095		41,21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,00		18,71		124,73		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	85,00		72,00		84,71		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP		WTP		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	75,54		36,60		48,45		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,13		5,12		240,38		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
		Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,74		5,07		291,38		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	32,00		26,38		82,44		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	21,00		16,30		77,62		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,80		1,66		92,22		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6,00		39,10		651,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20,00		20,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8,00		7,49		93,63		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Penyerapan Anggaran	Skor	20,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
		Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
5.02.03	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.026.007.000		216.160.250		10,67	Badan Keuangan dan Aset	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Daerah	
		Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya		Ya		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00		59,00		59,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	RENDAH
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	25,00		33,20		132,80		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	70,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	Baik		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	Baik		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	Baik		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG
		Administrasi BMD yang Andal	Indeks	Baik		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG
5.02.0.00.0.0 0.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				34.824.748.125		16.022.824.013	132,29	40,26	Badan Pendapatan Daerah	MELAMPAUI
5.02	KEUANGAN				34.824.748.125		16.022.824.013	132,29	40,26	Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				29.591.005.025		14.345.981.764	48,48		Badan Pendapatan Daerah	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT TINGGI
5.02.04	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah				5.233.743.100		1.676.842.249		32,04	Badan Pendapatan Daerah	
		Rasio PAD	Persen	0,83		0,27		32,53		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	12,65		71,33		17,73		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH
		Rasio Pajak daerah	Persen	49,84		69,90		140,25		Badan Pendapatan Daerah	MELAMPAUI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rasio retribusi daerah	Persen	4,53		26,26		579,69		Badan Pendapatan Daerah	MELAMPAUI
		Persentase capaian PAD	Persen	88,95		28,67		32,23		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH
		Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Persen	9,50		2,24		23,58		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH
5.03.5.04.0.0 0.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				38.617.529.518		9.012.859.735	149,85	32,33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
5.03	KEPEGAWAIAN				34.514.841.218		8.685.779.735	89,85	24,36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				29.128.325.618		7.436.337.680		25,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI
5.03.02	Program : Kepegawaian Daerah				5.386.515.600		1.249.442.055		23,20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	80,88		85,77		106,05		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	16,99		18,97		111,65		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	49,80		62,12		124,74		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00		29,00		85,29		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINGGI
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172,00		171,00		99,42		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	504,00		520,00		103,17		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,29		0,13		223,08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
		Persentase Pemberhentian ASN	Persen	5,73		2,00		34,90		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	2,15		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.102.688.300		327.080.000	60,00	7,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.02	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.102.688.300		327.080.000		7,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	25,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	1,00		2,40		240,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	51,01		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,86		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH
6.01.0.00.0.0 0.01.0000	INSPEKTORAT				31.335.945.006		13.598.425.004	50,34	36,35	Inspektorat	RENDAH
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				31.335.945.006		13.598.425.004	50,34	36,35	Inspektorat	
6.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				26.861.965.006		12.152.740.004		45,24	Inspektorat	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Inspektorat	SANGAT TINGGI
6.01.02	Program : Penyelenggaraan Pengawasan				3.047.950.000		1.006.589.000		33,03	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Level	3,00		3,00		100,00		Inspektorat	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintah (APIP)									
		Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80,00		21,48		26,86		Inspektorat	SANGAT RENDAH
		Jumlah temuan BPK	Laporan	10,00		4,00		40,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH
		Persentase rivi u laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100,00		85,50		85,50		Inspektorat	TINGGI
6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				1.426.030.000		439.096.000		30,79	Inspektorat	
		Capaian MCP KPK	Persen	81,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH
		Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	2,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.01.0000	KECAMATAN JATILUHUR				3.577.340.893		1.387.329.700	47,53	18,75	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.577.340.893		1.387.329.700	47,53	18,75	Kecamatan Jatiluhur	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.366.107.293		1.365.240.100		40,56	Kecamatan Jatiluhur	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				111.771.000		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Jatiluhur	MELAMPAUI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30.704.600		22.089.600		71,94	Kecamatan Jatiluhur	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		71,94		71,94		Kecamatan Jatiluhur	SEDANG
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				5.213.000		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				50.300.000		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13.245.000		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0	KECAMATAN SUKASARI				3.441.332.071		1.479.182.389	35,42	12,65	Kecamatan Sukasari	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02.0000											RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.441.332.071		1.479.182.389	35,42	12,65	Kecamatan Sukasari	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.229.146.471		1.465.710.789		45,39	Kecamatan Sukasari	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		100,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				100.000.000		0		0,00	Kecamatan Sukasari	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				5.851.000		0		0,00	Kecamatan Sukasari	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				3.721.000		0		0,00	Kecamatan Sukasari	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				58.480.000		0		0,00	Kecamatan Sukasari	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44.133.600		13.471.600		30,52	Kecamatan Sukasari	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		12,50		12,50		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.03.0000	KECAMATAN MANIIS				3.218.289.234		1.466.382.861	53,71	16,31	Kecamatan Maniis	RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.218.289.234		1.466.382.861	53,71	16,31	Kecamatan Maniis	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.969.189.734		1.445.975.861		48,70	Kecamatan Maniis	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		BB		114,29		Kecamatan Maniis	MELAMPAUI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				123.655.000		0		0,00	Kecamatan Maniis	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Maniis	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				31.030.000		8.925.000		28,76	Kecamatan Maniis	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Maniis	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				6.820.000		0		0,00	Kecamatan Maniis	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Maniis	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				56.247.000		11.482.000		20,41	Kecamatan Maniis	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		8,00		8,00		Kecamatan Maniis	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.347.500		0		0,00	Kecamatan Maniis	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Maniis	SANGAT TINGGI
7.01.0.00.0.0 0.04.0000	KECAMATAN TEGALWARU				3.565.987.728		1.321.533.631	46,38	23,14	Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.565.987.728		1.321.533.631	46,38	23,14	Kecamatan Tegalwaru	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.258.001.828		1.263.301.731		38,78	Kecamatan Tegalwaru	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				135.128.000		13.811.000		10,22	Kecamatan Tegalwaru	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Tegalwaru	MELAMPAUI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				43.313.900		23.767.900		54,87	Kecamatan Tegalwaru	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		20,00		20,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				12.161.000		0		0,00	Kecamatan Tegalwaru	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				68.459.000		12.396.000		18,11	Kecamatan Tegalwaru	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		25,00		25,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				48.924.000		8.257.000		16,88	Kecamatan Tegalwaru	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		20,00		20,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.05.0000	KECAMATAN PLERED				3.755.398.442		1.631.351.666	40,48	18,83	Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.755.398.442		1.631.351.666	40,48	18,83	Kecamatan Plered	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.567.095.586		1.608.723.766		45,10	Kecamatan Plered	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		CC		75,00		Kecamatan Plered	SEDANG
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				107.274.956		0		0,00	Kecamatan Plered	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Plered	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				33.327.900		22.627.900		67,89	Kecamatan Plered	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		67,89		67,89		Kecamatan Plered	SEDANG
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				2.000.000		0		0,00	Kecamatan Plered	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				35.700.000		0		0,00	Kecamatan Plered	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.000.000		0		0,00	Kecamatan Plered	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.06.0000	KECAMATAN SUKATANI				4.128.546.775		1.648.184.740	53,33	20,64	Kecamatan Sukatani	RENDAH
7.01	KECAMATAN				4.128.546.775		1.648.184.740	53,33	20,64	Kecamatan Sukatani	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.918.982.151		1.625.913.740		41,49	Kecamatan Sukatani	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				116.410.000		6.390.000		5,49	Kecamatan Sukatani	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				13.000.000		0		0,00	Kecamatan Sukatani	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				5.500.000		0		0,00	Kecamatan Sukatani	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				54.000.000		0		0,00	Kecamatan Sukatani	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan	Persen	100,00		40,00		40,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan									RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.654.624		15.881.000		76,89	Kecamatan Sukatani	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		80,00		80,00		Kecamatan Sukatani	TINGGI
7.01.0.00.0.0 0.07.0000	KECAMATAN DARANGDAN				4.354.038.999		964.026.330	38,54	21,21	Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				4.354.038.999		964.026.330	38,54	21,21	Kecamatan Darangdan	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.621.703.099		807.182.430		22,29	Kecamatan Darangdan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				513.398.000		133.334.000		25,97	Kecamatan Darangdan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Darangdan	MELAMPAUI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				25.826.000		3.115.000		12,06	Kecamatan Darangdan	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				19.843.000		2.140.000		10,78	Kecamatan Darangdan	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				140.758.000		0		0,00	Kecamatan Darangdan	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				32.510.900		18.254.900		56,15	Kecamatan Darangdan	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		18,00		18,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.08.0000	KECAMATAN BOJONG				4.260.383.744		1.424.412.882	68,75	21,26	Kecamatan Bojong	SEDANG
7.01	KECAMATAN				4.260.383.744		1.424.412.882	68,75	21,26	Kecamatan Bojong	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.603.706.744		1.388.544.882		38,53	Kecamatan Bojong	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		A		112,50		Kecamatan Bojong	MELAMPAUI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				509.313.000		0		0,00	Kecamatan Bojong	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Bojong	SANGAT TINGGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				8.020.000		0		0,00	Kecamatan Bojong	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				9.450.000		0		0,00	Kecamatan Bojong	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97.860.000		10.920.000		11,16	Kecamatan Bojong	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				32.034.000		24.948.000		77,88	Kecamatan Bojong	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.09.0000	KECAMATAN WANAYASA				4.090.618.856		1.738.464.024	38,54	19,23	Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				4.090.618.856		1.738.464.024	38,54	19,23	Kecamatan Wanayasa	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.880.023.856		1.709.585.024		44,06	Kecamatan Wanayasa	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				112.600.000		10.150.000		9,01	Kecamatan Wanayasa	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				4.905.000		0		0,00	Kecamatan Wanayasa	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				3.360.000		840.000		25,00	Kecamatan Wanayasa	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				41.777.000		0		0,00	Kecamatan Wanayasa	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				47.953.000		17.889.000		37,31	Kecamatan Wanayasa	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		31,25		31,25		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.0 0.10.0000	KECAMATAN KIARAPEDES				3.682.603.115		994.505.568	66,67	51,68	Kecamatan Kiarapedes	SEDANG
7.01	KECAMATAN				3.682.603.115		994.505.568	66,67	51,68	Kecamatan Kiarapedes	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.523.251.115		923.523.568		26,21	Kecamatan Kiarapedes	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				105.000.000		43.560.000		41,49	Kecamatan Kiarapedes	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				4.750.000		2.980.000		62,74	Kecamatan Kiarapedes	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				5.054.000		4.304.000		85,16	Kecamatan Kiarapedes	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				35.033.000		15.308.000		43,70	Kecamatan Kiarapedes	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				9.515.000		4.830.000		50,76	Kecamatan Kiarapedes	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI
7.01.0.00.0.0 0.11.0000	KECAMATAN PASAWAHAN				3.356.929.910		1.420.143.864	62,90	20,04	Kecamatan Pasawahan	RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.356.929.910		1.420.143.864	62,90	20,04	Kecamatan Pasawahan	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.129.704.910		1.340.960.364		42,85	Kecamatan Pasawahan	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				0		0		0,00	Kecamatan Pasawahan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				150.173.000		40.173.000		26,75	Kecamatan Pasawahan	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		26,75		26,75		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				0		0		0,00	Kecamatan Pasawahan	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				0		0		0,00	Kecamatan Pasawahan	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				77.052.000		39.010.500		50,63	Kecamatan Pasawahan	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,62		50,62		Kecamatan Pasawahan	RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.12.0000	KECAMATAN PONDOKSALAM				3.633.417.407		749.802.774	26,77	24,03	Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.633.417.407		749.802.774	26,77	24,03	Kecamatan Pondoksalam	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.343.715.807		703.681.174		21,04	Kecamatan Pondoksalam	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				100.000.000		0		0,00	Kecamatan Pondoksalam	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		0,00		0,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				21.300.000		10.650.000		50,00	Kecamatan Pondoksalam	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				10.650.000		0		0,00	Kecamatan Pondoksalam	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				133.990.000		22.000.000		16,42	Kecamatan Pondoksalam	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		10,60		10,60		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				23.761.600		13.471.600		56,69	Kecamatan Pondoksalam	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.13.0000	KECAMATAN PURWAKARTA				26.365.021.962		10.422.283.650	71,65	14,04	Kecamatan Purwakarta	SEDANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01	KECAMATAN				26.365.021.962		10.422.283.650	71,65	14,04	Kecamatan Purwakarta	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				16.917.700.944		6.975.370.550	41,23		Kecamatan Purwakarta	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				610.712.018		10.520.000	1,72		Kecamatan Purwakarta	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Purwakarta	MELAMPAUI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				8.663.849.000		3.435.393.100	39,65		Kecamatan Purwakarta	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				87.500.000		0	0,00		Kecamatan Purwakarta	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT TINGGI
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60.260.000		1.000.000	1,66		Kecamatan Purwakarta	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		33,33		33,33		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25.000.000		0	0,00		Kecamatan Purwakarta	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		33,33		33,33		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.14.0000	KECAMATAN BABAKAN CIKAO				3.460.825.015		1.716.779.277	46,24	20,97	Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.460.825.015		1.716.779.277	46,24	20,97	Kecamatan Babakan Cikao	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.211.825.015		1.686.126.277	52,50		Kecamatan Babakan Cikao	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				125.000.000		11.401.000	9,12		Kecamatan Babakan Cikao	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Babakan Cikao	MELAMPAUI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				30.000.000		19.252.000	64,17		Kecamatan Babakan Cikao	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		64,17		64,17		Kecamatan Babakan Cikao	RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				10.000.000		0	0,00		Kecamatan Babakan Cikao	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80.000.000		0	0,00		Kecamatan Babakan Cikao	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4.000.000		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.15.0000	KECAMATAN CAMPAKA				3.573.750.107		1.500.936.192	54,88	27,73	Kecamatan Campaka	RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.573.750.107		1.500.936.192	54,88	27,73	Kecamatan Campaka	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.307.839.207		1.450.618.292		43,85	Kecamatan Campaka	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		BB		114,29		Kecamatan Campaka	MELAMPAUI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				118.960.000		15.090.000		12,68	Kecamatan Campaka	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Campaka	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				21.529.000		0		0,00	Kecamatan Campaka	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				14.260.000		4.260.000		29,87	Kecamatan Campaka	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		25,00		25,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				77.394.000		7.050.000		9,11	Kecamatan Campaka	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		40,00		40,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				33.767.900		23.917.900		70,83	Kecamatan Campaka	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		50,00		50,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH
7.01.0.00.0.0 0.16.0000	KECAMATAN CIBATU				4.124.682.803		1.731.271.901	28,57	19,77	Kecamatan Cibatu	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				4.124.682.803		1.731.271.901	28,57	19,77	Kecamatan Cibatu	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.805.153.507		1.716.561.901		45,11	Kecamatan Cibatu	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		C		71,43		Kecamatan Cibatu	SEDANG
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				182.478.500		0		0,00	Kecamatan Cibatu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		0,00		0,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT RENDAH
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				0		0	0,00		Kecamatan Cibatu	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				0		0	0,00		Kecamatan Cibatu	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				117.040.796		0	0,00		Kecamatan Cibatu	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.010.000		14.710.000		73,51	Kecamatan Cibatu	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibatu	SANGAT TINGGI
7.01.0.00.0.0 0.17.0000	KECAMATAN BUNGURSARI				3.418.969.154		1.404.621.279	37,50	22,03	Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN				3.418.969.154		1.404.621.279	37,50	22,03	Kecamatan Bungursari	
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.220.260.154		1.384.797.279		43,00	Kecamatan Bungursari	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT TINGGI
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				16.012.000		11.812.000		73,77	Kecamatan Bungursari	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT TINGGI
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				112.849.000		0		0,00	Kecamatan Bungursari	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				10.650.000		0		0,00	Kecamatan Bungursari	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				52.040.000		8.012.000		15,40	Kecamatan Bungursari	
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		25,00		25,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				7.158.000		0		0,00	Kecamatan Bungursari	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
8.01.0.00.0.0 0.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				51.578.977.434		32.380.192.175	32,12	26,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				51.578.977.434		32.380.192.175	32,12	26,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.915.105.934		1.422.810.675		36,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT TINGGI
8.01.02	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				928.764.900		87.396.000		9,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00		9,40		9,40		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH
8.01.03	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				44.960.114.200		30.300.000.000		67,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH
		Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00		67,39		67,39		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SEDANG
8.01.04	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				224.920.000		0		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH
8.01.05	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				180.965.900		13.339.500		7,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00		7,37		7,37		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH
8.01.06	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				1.369.106.500		556.646.000		40,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		40,65		40,65		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap RPD

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja diatas, diperoleh data bahwa terdapat 715 indikator program tahun 2024 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1. Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program
Tahun 2024 Triwulan 2

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA KINERJA	JUMLAH
1	$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH	410
2	$51\% \leq 65\%$	RENDAH	48
3	$66\% \leq 75\%$	SEDANG	26
4	$76\% \leq 90\%$	TINGGI	38
5	$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI	121
6	$> 100\%$	MELAMPAUI	72
JUMLAH			715

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.3

Rekap Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan 2 per Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
		Rp	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.709.858.394.270	1.013.013.265.627	47,76	37,38	Kabupaten Purwakarta	SANGAT RENDAH
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	714.756.181.859	275.445.170.120	89,58	14,55	Dinas Pendidikan	TINGGI
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	237.686.073.189	45.645.114.136	67,65	21,34	Dinas Kesehatan	SEDANG
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	204.061.620.297	100.011.539.441	96,21	12,61	RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	175.965.176.236	58.895.509.491	28,86	23,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.375.849.657	5.943.534.910	55,81	15,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63.156.879.235	21.650.692.684	72,38	21,51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.946.468.066	10.951.771.053	52,00	41,28	Satuan Polisi Pamong Praja	RENDAH
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.640.356.796	2.078.682.833	58,40	26,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
		Rp	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.890.749.232	6.969.923.366	83,78	34,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.814.055.851	3.736.432.044	26,35	19,84	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	817.718.500	139.379.000	22,66	8,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.269.756.576	4.710.837.416	18,57	35,75	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	425.000.000	40.524.000	20,00	36,07	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	19.672.193.717	7.355.233.330	30,50	20,35	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	9.340.000.000	696.684.000	24,99	24,72	Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	44.771.469.821	18.745.808.896	55,40	21,43	Dinas Lingkungan Hidup	RENDAH
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.247.960.689	9.283.898.059	93,95	47,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.283.734.005	7.372.804.965	86,04	28,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TINGGI
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23.266.501.469	3.573.133.760	32,77	12,20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
		Rp	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43.862.873.684	19.157.079.165	123,27	30,68	Dinas Perhubungan	MELAMPAUI
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.733.120.106	5.138.052.890	28,98	19,38	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	912.250.000	130.325.000	17,94	14,29	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.203.862.000	238.532.500	26,35	19,81	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.124.200.678	7.044.574.749	21,63	14,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	952.772.800	273.118.800	35,20	22,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.049.913.000	451.664.000	46,50	34,42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	14.699.308.112	6.350.358.801	77,13	23,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TINGGI
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.076.955.312	10.898.246.701	46,25	33,06	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.551.250.000	414.740.000	10,41	6,76	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.002.500.000	701.691.000	32,71	38,96	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	11.964.565.976	4.802.649.191	9,38	24,11	Dinas Kearsipan dan	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
		Rp	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERPUSTAKAAN					Perpustakaan	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	461.627.000	199.664.744	22,80	21,63	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.482.869.614	7.116.672.768	98,61	23,24	Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.288.419.649	671.852.200	63,35	33,03	Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	81.416.093.594	28.257.265.098	39,11	28,16	Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	92.950.000	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH
4.02	SEKRETARIAT DPRD	84.203.465.484	48.907.805.277	40,94	57,88	Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH
5.01	PERENCANAAN	15.044.843.427	6.151.949.178	48,17	38,98	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	848.750.000	16.652.060	0,00	1,96	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH
5.02	KEUANGAN	481.132.722.341	178.828.184.346	105,60	24,37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI
5.02	KEUANGAN	34.824.748.125	16.022.824.013	132,29	40,26	Badan Pendapatan Daerah	MELAMPAUI
5.03	KEPEGAWAIAN	34.514.841.218	8.685.779.735	89,85	24,36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINGGI
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.102.688.300	327.080.000	60,00	7,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
		Rp	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	31.335.945.006	13.598.425.004	50,34	36,35	Inspektorat	RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.577.340.893	1.387.329.700	47,53	18,75	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.441.332.071	1.479.182.389	35,42	12,65	Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.218.289.234	1.466.382.861	53,71	16,31	Kecamatan Maniis	RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.565.987.728	1.321.533.631	46,38	23,14	Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.755.398.442	1.631.351.666	40,48	18,83	Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	4.128.546.775	1.648.184.740	53,33	20,64	Kecamatan Sukatani	RENDAH
7.01	KECAMATAN	4.354.038.999	964.026.330	38,54	21,21	Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	4.260.383.744	1.424.412.882	68,75	21,26	Kecamatan Bojong	SEDANG
7.01	KECAMATAN	4.090.618.856	1.738.464.024	38,54	19,23	Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.682.603.115	994.505.568	66,67	51,68	Kecamatan Kiarapedes	SEDANG
7.01	KECAMATAN	3.356.929.910	1.420.143.864	62,90	20,04	Kecamatan Pasawahan	RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.633.417.407	749.802.774	26,77	24,03	Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	26.365.021.962	10.422.283.650	71,65	14,04	Kecamatan Purwakarta	SEDANG
7.01	KECAMATAN	3.460.825.015	1.716.779.277	46,24	20,97	Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.573.750.107	1.500.936.192	54,88	27,73	Kecamatan Campaka	RENDAH
7.01	KECAMATAN	4.124.682.803	1.731.271.901	28,57	19,77	Kecamatan Cibatuh	SANGAT RENDAH
7.01	KECAMATAN	3.418.969.154	1.404.621.279	37,50	22,03	Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.578.977.434	32.380.192.175	32,12	26,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH

Sumber : Laporan Monev Triwulan II Tahun 2024

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2024

Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Adanya penerimaan dana transfer dari pusat dan daerah provinsi Jawa Barat yang harus dilakukan penyesuaian pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
2. Adanya kegiatan dan subkegiatan yang output dan target belum berkesesuaian;
3. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang kurang mendongkrak dalam pencapaian target kinerja indikator program;
4. Terbatasnya SDM pelaksana kegiatan/subkegiatan di perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
5. Adanya kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti, sehingga berdampak pada penundaan pelaksanaan sebagian kegiatan/subkegiatan, termasuk persiapan penyaluran hibah pelaksanaan pilkada serentak;
6. Masih terdapatnya sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penyesuaian pagu anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang berkenaan;
2. Mengevaluasi kembali output kegiatan/subkegiatan yang kurang sesuai dengan capaian target kinerjanya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja program perangkat daerah;
4. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan/subkegiatan;
5. Penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional;
6. Memprioritaskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan guna menunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas;

Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sampai dengan Triwulan II

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM di Kabupaten Purwakarta tahun 2024 pada triwulan II, sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat beberapa indikator capaian SPM yang harus di dorong dan didukung baik dari aspek anggaran maupun SDM pelaksanaanya. Adapun Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 triwulan II dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Triwulan II

NO	NAMA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN SPM
1	PENDIDIKAN	77,43
2	KESEHATAN	32,47
3	PEKERJAAN UMUM	0,12
4	PERUMAHAN RAKYAT	8,50
5	TRANTIBUMLINMAS	63,17
6	SOSIAL	91,00
	KAB. PURWAKARTA	45,45 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Pada tahun ini, Kabupaten Purwakarta mencatat capaian Sistem Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (SPM) yang bervariasi di beberapa bidang urusan pemerintahan. Bidang Pendidikan menunjukkan capaian tertinggi dengan skor 77,43, mengindikasikan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Di sektor Kesehatan, capaian SPM mencapai 32,47, menunjukkan upaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat bidang lain seperti Pekerjaan Umum yang masih menunjukkan capaian yang rendah, hanya mencapai 0,12. Begitu pula dengan Perumahan Rakyat yang mencatatkan capaian 8,50, menandakan perlunya

peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Di bidang Trantibumlinmas, capaian SPM mencapai 63,17, menunjukkan fokus pada penegakan tata tertib dan ketertiban masyarakat.

Bidang Sosial mencatatkan capaian tertinggi sebesar 91,00, mencerminkan upaya besar dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat Purwakarta. Secara keseluruhan, Kabupaten Purwakarta berhasil mencapai capaian SPM sebesar 45,45%, menunjukkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan dalam memajukan berbagai sektor pelayanan publik untuk kesejahteraan bersama.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rumusan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan ekonomi di wilayahnya. Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.

Prinsip-prinsip dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, antara lain : 1). Berbasis Potensi Daerah, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi pariwisata. 2). Berkelanjutan, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. 3). Inklusif, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh semua pihak. dan 4). Terintegrasi, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan sektoral lainnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 mempertimbangkan hasil capaian realisasi indikator makro pembangunan tahun 2023 serta proyeksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2024. Adapun capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu

tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut merangkak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen. Namun di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke angka 4,97 persen.

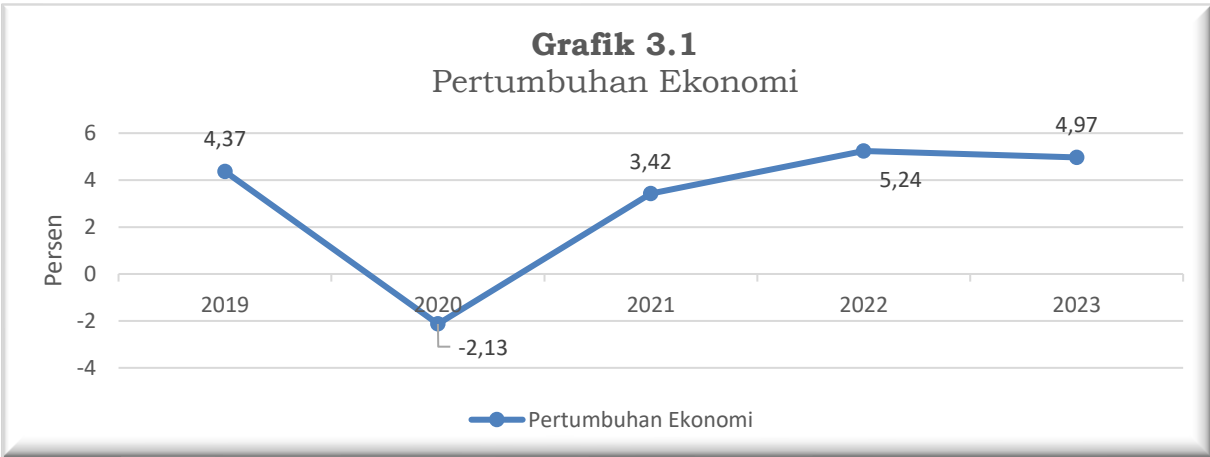
Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



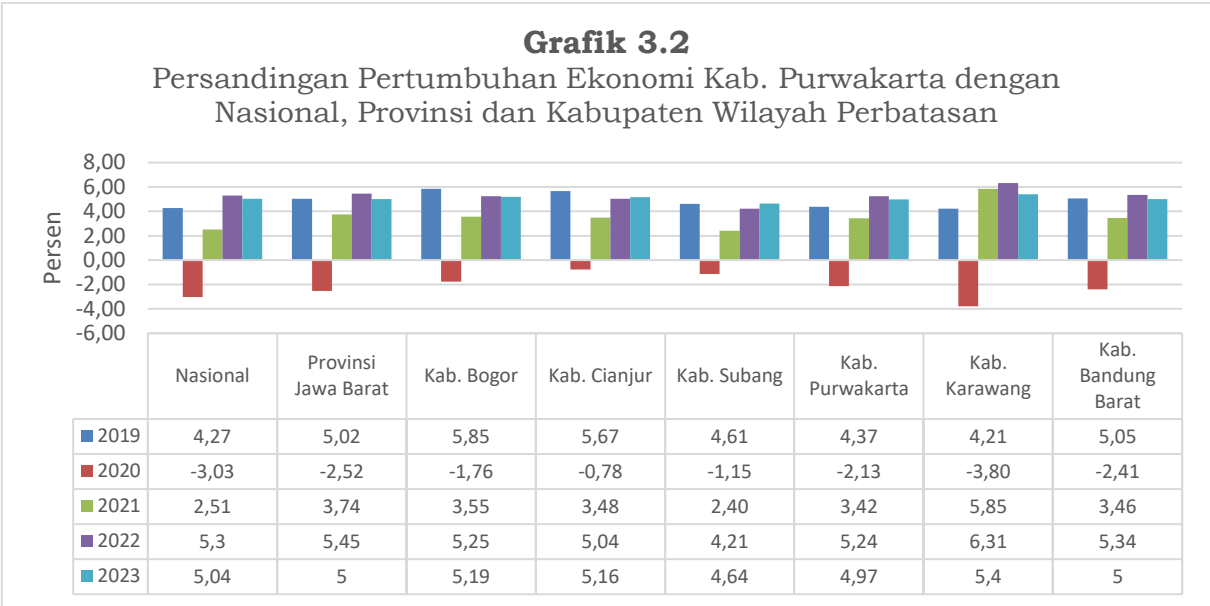
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	4,27	-3,03	2,51	5,30	5,04
2	Provinsi Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00
3	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
4	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
5	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,40	4,21	4,64
6	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
7	Kab. Karawang	4,21	-3,80	5,85	6,31	5,40
8	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kab. Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta sangat fluktuatif, dengan pertumbuhan positif di 2019, 2021, 2022, dan 2023, dan pertumbuhan negatif di 2020. Pertumbuhan di 2023 (4,97%) lebih rendah dibandingkan 2022 (5,24%). Penurunan terdalam terjadi di 2020 (-2,13%) akibat pandemi Covid-19. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi Covid-19 di 2020.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi

pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari

nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.720,79	2.726,05	2.770,71	2.870,50	2.901,24
B	Pertambangan dan Penggalian	31,59	30,91	33,49	33,2	33,46
C	Industri Pengolahan	26.974,84	26.205,23	27.126,57	28.876,61	30.483,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	279,6	274,22	306,12	314,04	323,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,15	14,84	16,27	16,64	16,98
F	Konstruksi	3.247,02	3.081,79	3.243,27	3.293,70	3.411,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.665,63	5.393,40	5.506,10	5.717,88	5.914,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1.060,28	1.029,85	1.037,98	1.091,34	1.199,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,21	556,41	561,28	595,94	636,99
J	Informasi dan Komunikasi	988,61	1.265,58	1.345,83	1.406,78	1.508,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046,73	1.053,51	1.125,29	1.124,97	1.155,96
L	Real Estat	636,8	638,17	698,51	736,1	778,06
M, N	Jasa Perusahaan	214,89	202,6	219,43	240,03	255,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522,5	499,32	488,12	480,35	487,99
P	Jasa Pendidikan	1.005,91	1.065,31	1.080,25	1.103,42	1.148,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,64	225,61	240,38	251,87	265,39
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.068,02	1.030,44	1.040,55	1.139,61	1.219,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.582,19	4.650,21	4.650,04	5.026,60	5.332,31
B	Pertambangan dan Penggalian	43,44	43,07	47,94	49,2	50,85
C	Industri Pengolahan	38.714,75	38.224,62	40.769,59	44.549,33	47.918,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	450,52	441,74	502,83	520,9	540,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,73	24,63	27,16	28,08	28,89
F	Konstruksi	5.166,05	4.926,75	5.342,72	5.640,50	6.044,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.122,54	7.828,29	8.048,88	8.492,28	8.985,27
H	Transportasi dan Pergudangan	1.687,67	1.669,51	1.720,99	1.892,07	2.217,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	762,19	745,1	778,21	855,08	947,81
J	Informasi dan Komunikasi	968,79	1.241,29	1.293,62	1.314,43	1.409,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.675,07	1.680,88	1.824,62	1.982,94	2.080,86

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
L	Real Estat	867,31	875,85	961,5	1.024,64	1.091,60
M, N	Jasa Perusahaan	327,99	316,27	343,89	380,77	420,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903,63	868,07	856,85	841,98	864,88
P	Jasa Pendidikan	1.521,95	1.651,87	1.715,10	1.782,21	1.891,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,17	337,35	363,37	386,03	418,48
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.560,51	1.526,09	1.530,92	1.710,50	1.886,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,15	0,19	1,64	3,6	1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,08	-2,13	8,32	-0,85	0,77
C	Industri Pengolahan	3,09	-2,85	3,52	6,45	5,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,28	-1,92	11,63	2,58	2,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	12,8	9,63	2,31	2,04
F	Konstruksi	5,88	-5,09	5,24	1,55	3,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	-4,8	2,09	3,85	3,44
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	-2,87	0,79	5,14	9,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	-3,1	0,88	6,17	6,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,67	28,02	6,34	4,53	7,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	0,65	6,81	-0,03	2,76
L	Real Estat	9,3	0,22	9,46	5,38	5,7
M, N	Jasa Perusahaan	9,23	-5,72	8,31	9,39	6,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	-4,44	-2,24	-1,59	1,59
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,9	1,4	2,14	4,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	-0,89	6,54	4,78	5,37
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,09	-3,52	0,98	9,52	6,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	6,94	6,57	6,57	6,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
C	Industri Pengolahan	57,18	57,01	57,6	58,25	58,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,66	0,71	0,68	0,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,63	7,35	7,55	7,38	7,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	11,68	11,37	11,1	10,94
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,49	2,43	2,47	2,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,11	1,1	1,12	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,43	1,85	1,83	1,72	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	2,51	2,58	2,59	2,53
L	Real Estat	1,28	1,31	1,36	1,34	1,33
M, N	Jasa Perusahaan	0,48	0,47	0,49	0,5	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	1,29	1,21	1,1	1,05

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	2,25	2,46	2,42	2,33	2,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,5	0,51	0,5	0,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,3	2,28	2,16	2,24	2,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar -2,13% akibat pandemi COVID-19. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,42%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 5,24% dan 4,97%.

PDRB atas dasar harga berlaku mengalami Tren serupa dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar 1,91%. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,22%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 8,13% dan 7,54%.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan

fluktuasi selama periode 2019-2023. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 (5,24%), dan Laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,13%).

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan (26,33% pada tahun 2023). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (18,83%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,27%). Dengan demikian, Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	Kab. Purwakarta	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
	Kab. Karawang	163.732,48	157.849,53	166.941,49	177.470,89	187.051,65
	Kab. Subang	28.672,90	28.344,32	28.960,89	30.202,58	31.604,98
	Kab. Bandung Barat	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19
	Kab. Cianjur	32.039,32	31.790,76	32.897,52	34.556,40	36.339,55
	Kab. Bogor	156.876,01	154.113,60	159.589,55	167.966,18	176.683,58
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	Kab. Purwakarta	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
	Kab. Karawang	230.021,38	225.063,63	243.713,20	268.228,79	290.916,32
	Kab. Subang	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.160,40	49.692,22
	Kab. Bandung Barat	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18
	Kab. Cianjur	46.957,85	47.528,97	50.137,65	53.988,97	58.391,22
	Kab. Bogor	237.227,08	235.887,26	248.892,48	267.743,69	289.106,15
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
	Kab. Karawang	4,21	-3,8	5,85	6,31	5,4
	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,4	4,21	4,64
	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5
	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	3,16	3,16	3,15	3,13	3,11
	Kab. Karawang	10,73	10,54	10,86	10,96	11
	Kab. Subang	1,9	1,89	1,88	1,89	1,88
	Kab. Bandung Barat	2,2	2,19	2,17	2,16	2,15
	Kab. Cianjur	2,19	2,24	2,23	2,21	2,21
	Kab. Bogor	11,06	11,12	11,09	10,94	10,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

c. **Inflasi**

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

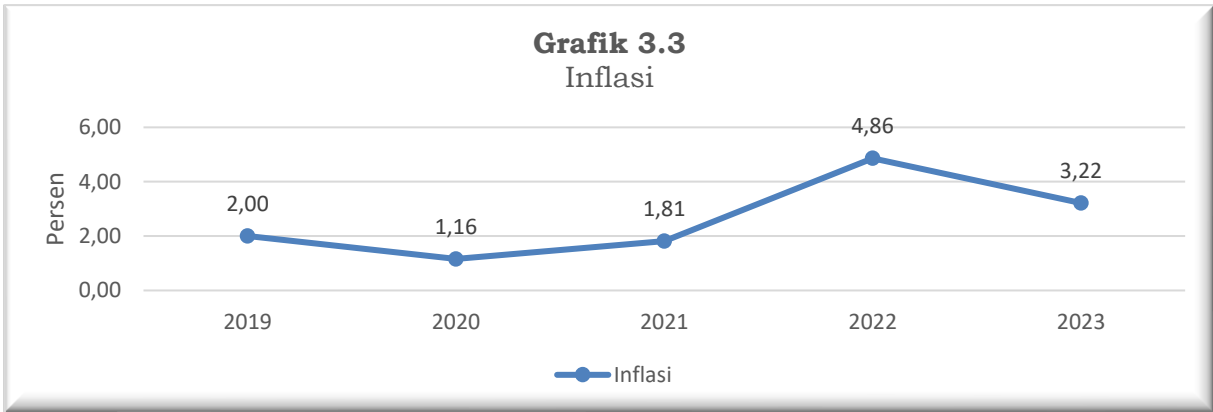
Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon sebagai *sister city* yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran inflasi Kabupaten Purwakarta, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.9
Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi	Persen	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Inflasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan data fluktuasi selama periode 2019-2023. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 (1,16%) dan Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (4,86%). Inflasi pada tahun 2023 (3,22%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerahnya.

Faktor-faktor yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta antara lain; Harga bahan makanan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta. Fluktuasi harga bahan makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca, musim, dan pasokan. Kemudian harga barang dan jasa lainnya, seperti transportasi, perumahan, dan pendidikan juga dapat mendorong inflasi. Selain itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), juga dapat mendorong inflasi.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain; dengan mengadakan operasi pasar secara rutin untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengadakan rapat untuk membahas perkembangan inflasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Kerjasama dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan makanan. kemudian Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga mengembangkan program ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan

makanan.

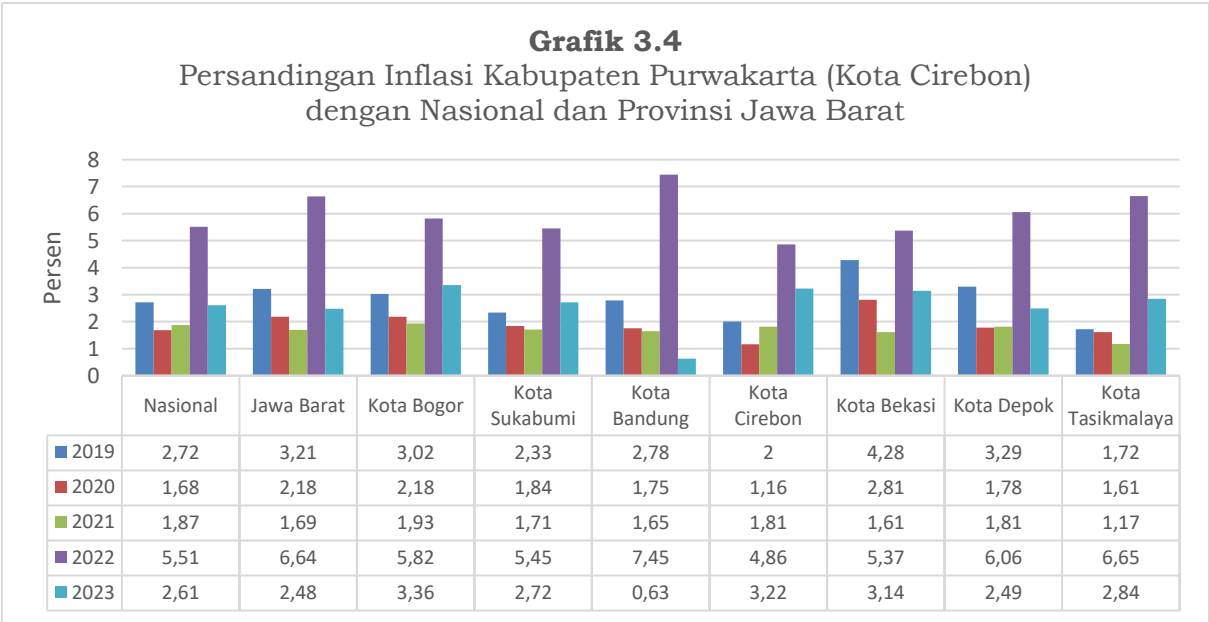
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Inflasi (persen)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,64	2,48
3	Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82	3,36
4	Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45	2,72
5	Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45	0,63
6	Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
7	Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37	3,14
8	Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06	2,49
9	Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.11

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,48	8,27	8,83	8,7	8,46
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



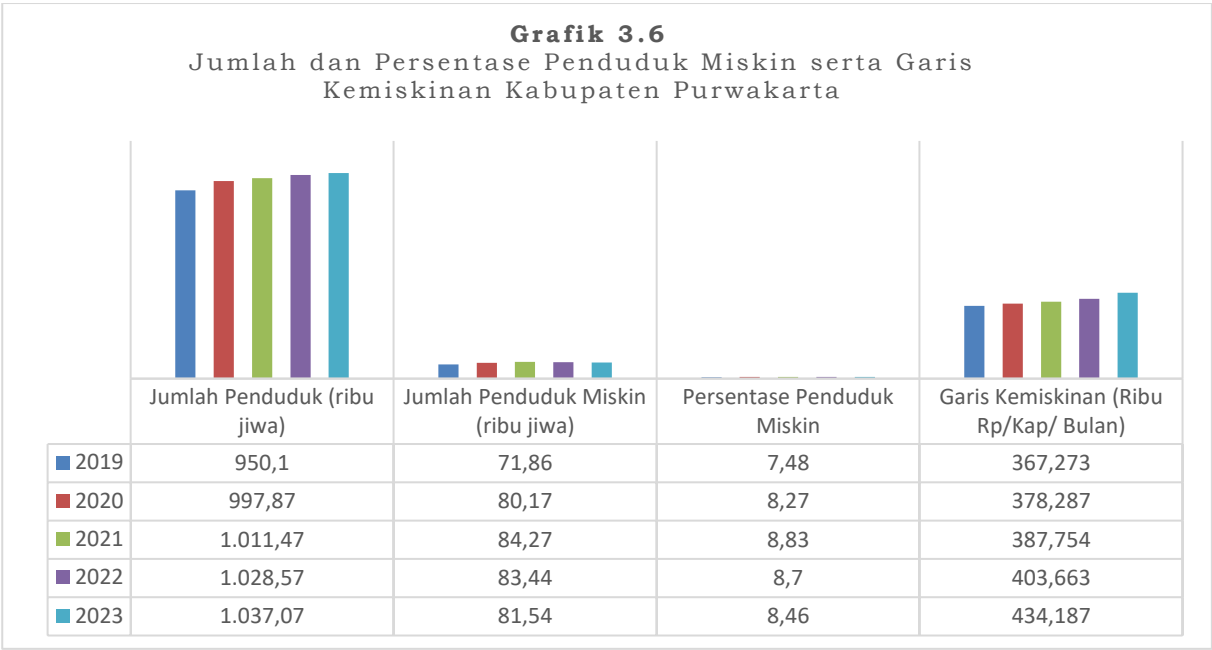
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.12

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54
3.	Persentase Penduduk Miskin	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
4.	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.13

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
	Kab. Karawang	2.353,92	2.439,09	2.468.58	2.505,25	2.526,00
	Kab. Subang	1.595,83	1.595,32	1.608.59	1.624,39	1.649,82
	Kab. Bandung Barat	1.699,90	1.788,34	1.814.23	1.846,97	1.859,64
	Kab. Cianjur	2.263,07	2.477,56	2.506.68	2.542,79	2.558,14
	Kab. Bogor	5.965,41	5.427,07	5.489.54	5.566,84	5.627,02
	Prov. Jawa Barat	49.316,7	48.274,2	48.782,4	49.405,81	49.860,33
	Nasional	268.074,6	270.203,9	272.682,5	275.773,8	278.696,2
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54
	Kab. Karawang	171,721	195,410	210,780	199,910	187,23
	Kab. Subang	127,460	149,810	158,970	155,340	152,33
	Kab. Bandung Barat	163,437	179,460	190,770	183,670	179,43
	Kab. Cianjur	209,751	234,470	260,020	246,810	240,06
	Kab. Bogor	395,000	465,670	491,240	474,740	453,76
	Prov. Jawa Barat	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98	3.888,60
	Nasional	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (persen)	Kab. Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
	Kab. Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87
	Kab. Subang	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52
	Kab. Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52
	Kab. Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
	Kab. Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
	Prov. Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
	Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Kab. Purwakarta	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187
	Kab. Karawang	440.347	466.152	496.201	521.158	555.889
	Kab. Subang	339.607	351.885	360.691	372.308	404.320
	Kab. Bandung Barat	341.307	362.212	374.470	393.956	426.355
	Kab. Cianjur	350.760	371.699	387.631	406.829	437.327
	Kab. Bogor	373.799	402.877	418.483	443.787	482.174
	Prov. Jawa Barat	391.009	411.342	433.041	477.969	495.229
	Nasional	418.515	437.902	464.474	513.170	547.175

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat kemiskinan, yang diukur dalam persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kenaikan dari 7,48% pada tahun 2019 menjadi 8,46% pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut, terlihat bahwa tingkat kemiskinan cenderung menurun setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021.

Secara paralel, jumlah penduduk miskin, yang diukur dalam ribu jiwa, menunjukkan peningkatan dari 71,86 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 81,54 ribu jiwa pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan absolut dalam jumlah ini, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi dampak kemiskinan meskipun tingkat kemiskinan secara umum masih stabil atau mengalami peningkatan yang kecil.

Dinamika ini mencerminkan tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan sosial dan ekonomi domestik, serta respon terhadap perubahan sosial dan demografis di dalam negeri. Upaya lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang tepat terus diimplementasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kemudian terkait Kemiskinan Ekstrem yang ada di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem terdiri dari, jumlah keluarga ekstrem sebanyak 5.668 keluarga dan individu sebanyak 30.397 jiwa.

Gambar 3.1

Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta



Perkembangan jumlah penduduk miskin ekstrem, selain dipengaruhi oleh tingkat garis kemiskinan dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, karena akan mempengaruhi perhitungan jumlah persentil 1 dan 2 pada Desil 1.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diukur berdasarkan tiga dimensi: Umur panjang dan sehat (diukur dengan UHH); Pengetahuan (diukur dengan APK-SD dan APS); Kehidupan yang layak (diukur dengan pengeluaran per kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin. Kemudian pada tahun 2023 ada peningkatan kembali menjadi 73,43 poin.

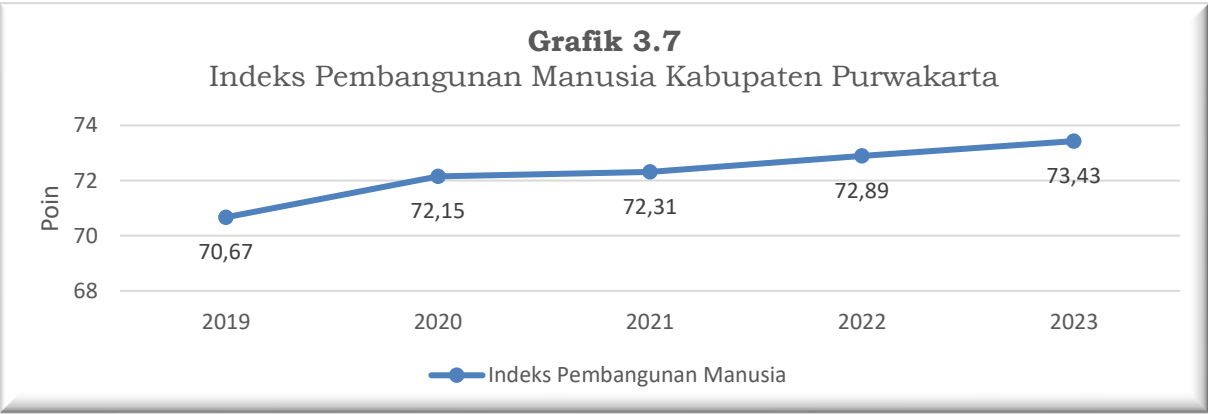
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.14

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,11	12,12	12,13	12,18
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	73,92	74,11	74,40	74,67
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rp	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

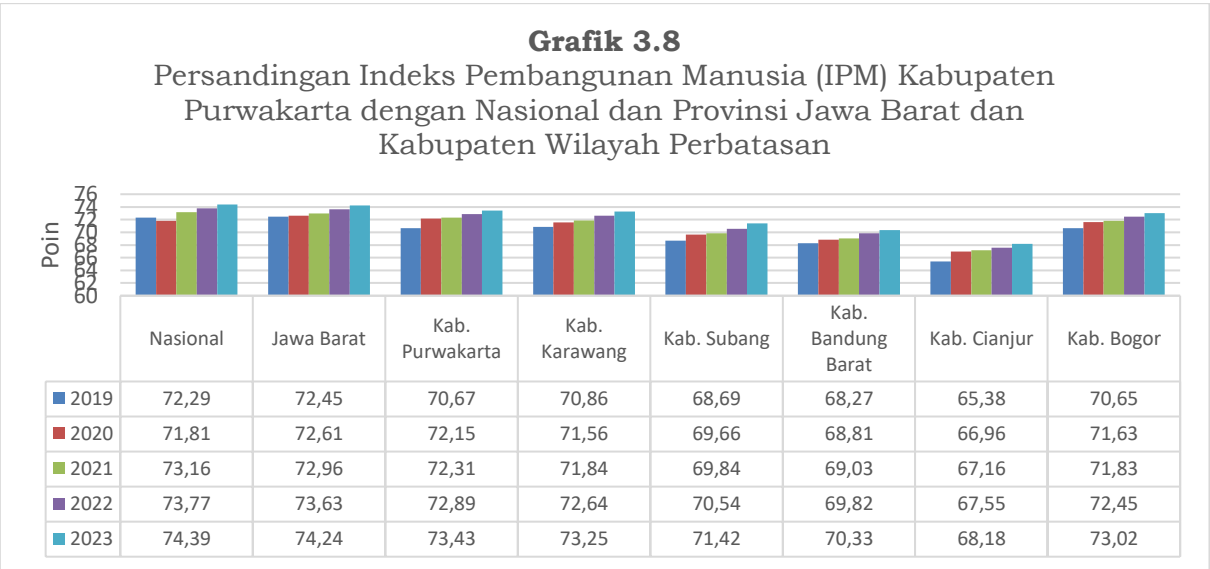
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indeks Pembagunan Manusia (IPM) (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	72,29	71,81	73,16	73,77	74,39
2	Jawa Barat	72,45	72,61	72,96	73,63	74,24
3	Kab. Purwakarta	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
4	Kab. Karawang	70,86	71,56	71,84	72,64	73,25
5	Kab. Subang	68,69	69,66	69,84	70,54	71,42
6	Kab. Bandung Barat	68,27	68,81	69,03	69,82	70,33
7	Kab. Cianjur	65,38	66,96	67,16	67,55	68,18
8	Kab. Bogor	70,65	71,63	71,83	72,45	73,02

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

IPM di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 (70,67) ke tahun 2023 (73,43). Peningkatan IPM ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan angka partisipasi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91. Namun demikian sampai dengan tahun 2023, perkembangan angka TPT dan TPAK secara berangsur menunjukan perkembangan yang positif, dimana pada tahun 2023 TPT Kabupaten Purwakarta berada pada angka 7,72 persen dan TPAK pada angka 66,37 persen.

Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi

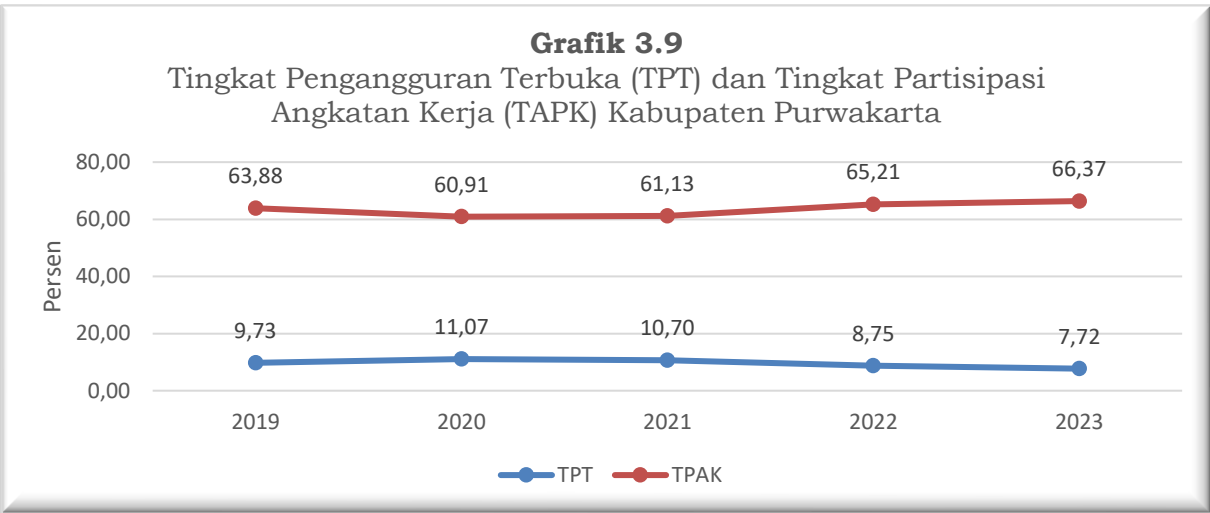
Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,7	8,75	7,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

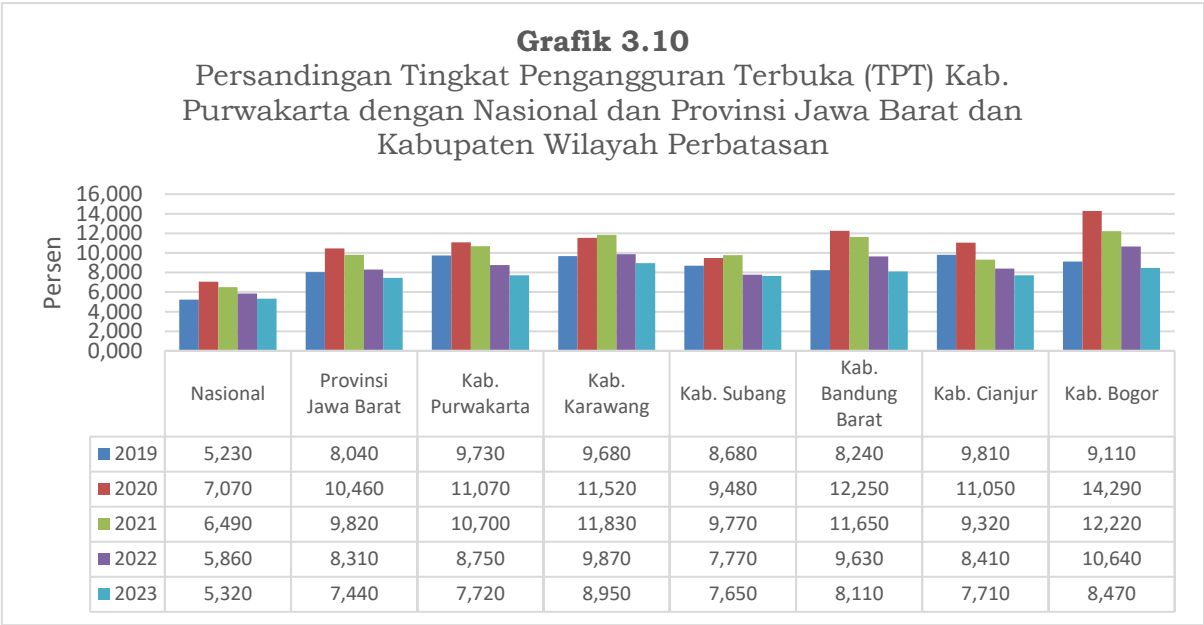
Tabel 3.17

Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2023

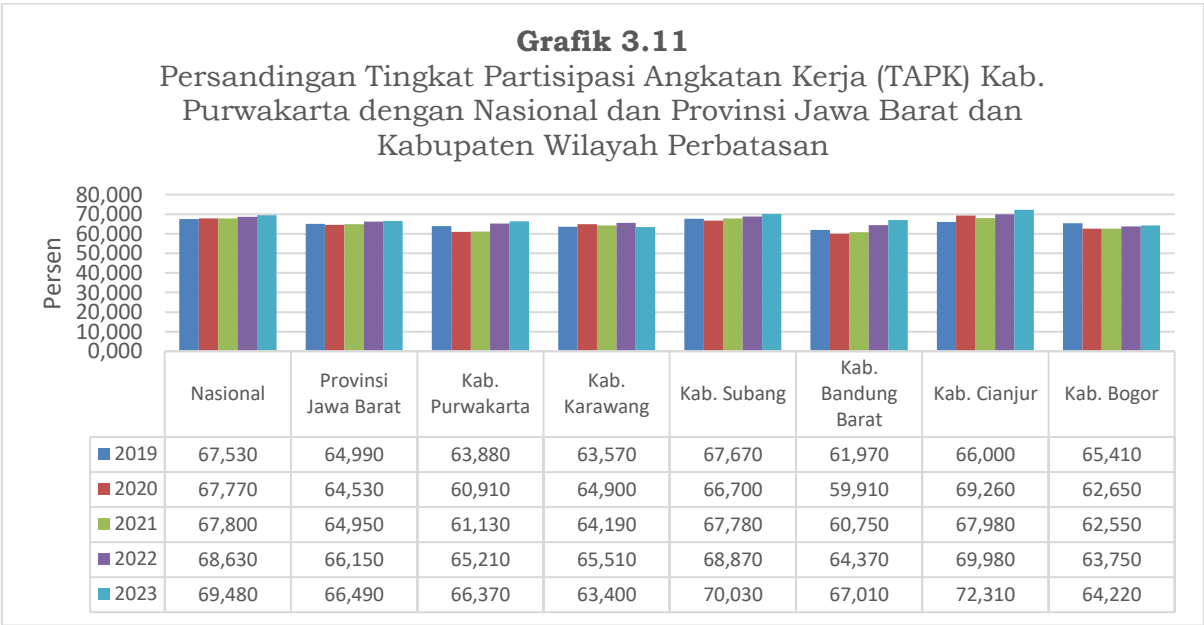
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Provinsi Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
Kab. Purwakarta	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72
Kab. Karawang	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95
Kab. Subang	8,68	9,48	9,77	7,77	7,65
Kab. Bandung Barat	8,24	12,25	11,65	9,63	8,11
Kab. Cianjur	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71
Kab. Bogor	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	67,53	67,77	67,80	68,63	69,48
Provinsi Jawa Barat	64,99	64,53	64,95	66,15	66,49
Kab. Purwakarta	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37
Kab. Karawang	63,57	64,90	64,19	65,51	63,40
Kab. Subang	67,67	66,70	67,78	68,87	70,03
Kab. Bandung Barat	61,97	59,91	60,75	64,37	67,01
Kab. Cianjur	66,00	69,26	67,98	69,98	72,31
Kab. Bogor	65,41	62,65	62,55	63,75	64,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

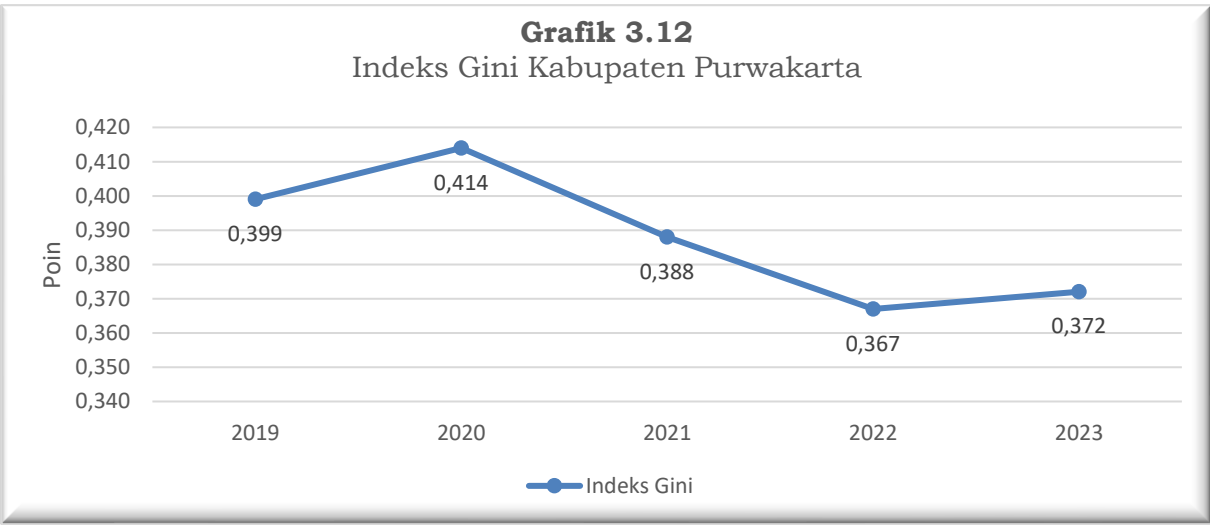
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.18

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Gini / Gini Rasio	Poin	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



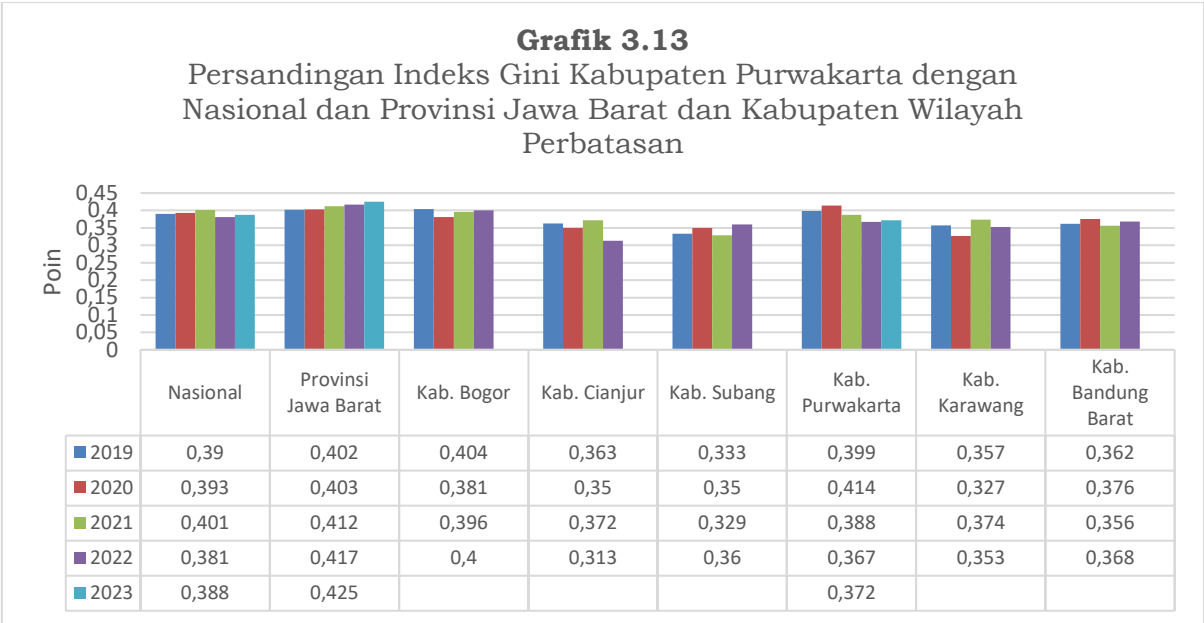
Tabel 3.19

Persandingan Indek Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	0,390	0,393	0,401	0,381	0,388
2	Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
3	Kab. Bogor	0,404	0,381	0,396	0,400	n/a
4	Kab. Cianjur	0,363	0,350	0,372	0,313	n/a

No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
5	Kab. Subang	0,333	0,350	0,329	0,360	n/a
6	Kab. Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372
7	Kab. Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353	n/a
8	Kab. Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368	n/a

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada tahun 2019, Indeks Gini atau Gini Rasio berada pada nilai 0,399, yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan menjadi 0,414, menandakan adanya peningkatan ketimpangan yang lebih tinggi dalam distribusi pendapatan atau kekayaan.

Tren kemudian berubah pada tahun 2021, di mana nilai Indeks Gini turun menjadi 0,388, menunjukkan adanya penurunan sedikit dalam ketimpangan ekonomi. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan, dengan Indeks Gini turun menjadi 0,367. Hal ini menandakan upaya atau perubahan kebijakan yang mungkin telah diimplementasikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, angka tersebut sedikit meningkat kembali pada tahun 2023, dengan Indeks Gini mencapai 0,372. Meskipun masih di bawah angka tahun 2020, peningkatan ini mungkin menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan yang berdampak pada ketimpangan ekonomi yang lebih besar.

h. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 walaupun masih dibawah capaian tahun 2019, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.

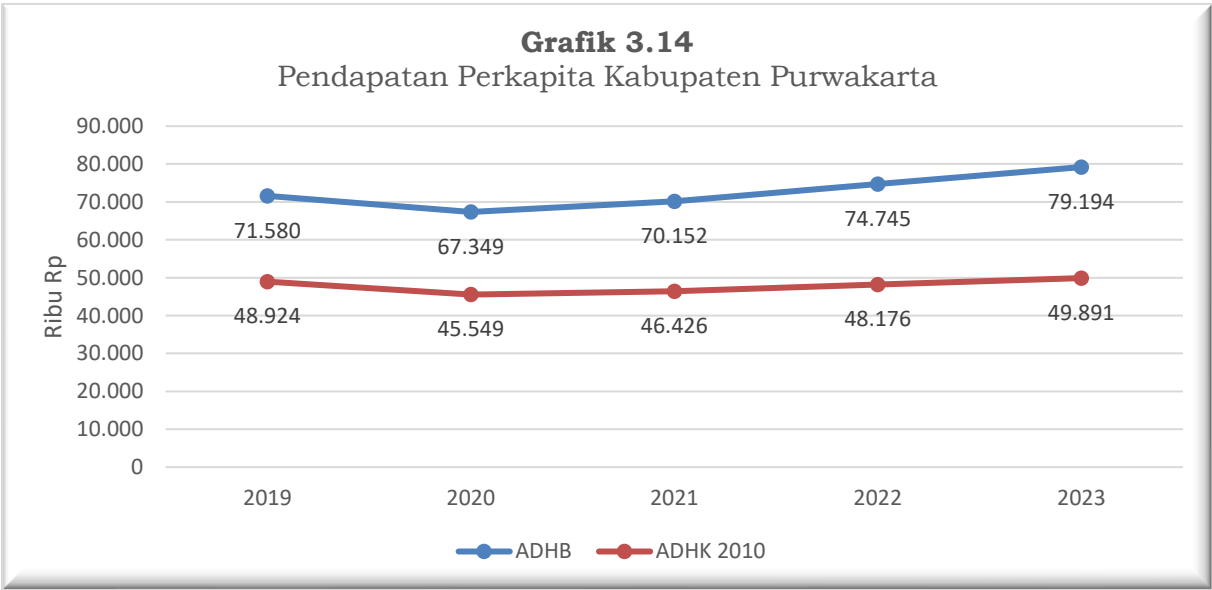
Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.20

Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB	Ribu Rp.	71.580	67.349	70.152	74.745	79.194
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010	Ribu Rp.	48.924	45.549	46.426	48.176	49.891

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pendapatan per kapita dari PDRB-ADHB pada tahun 2019 adalah sebesar 71.580 ribu rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 67.349 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 70.152 ribu rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan

pendapatan per kapita mencapai 74.745 ribu rupiah dan 79.194 ribu rupiah berturut-turut.

Sementara itu, pendapatan per kapita dari PDRB-ADHK 2010 juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 48.924 ribu rupiah, turun menjadi 45.549 ribu rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 46.426 ribu rupiah pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 48.176 ribu rupiah dan 49.891 ribu rupiah berturut-turut.

Meskipun kedua indikator menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan dalam skala nilai antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010, dengan PDRB ADHB memiliki nilai yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan PDRB ADHK 2010. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam metodologi perhitungan antara kedua pendekatan tersebut.

Dengan memperhatikan capaian realisasi indikator makro pembangunan pada tahun sebelumnya, maka di akhir tahun 2024 arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri pengolahan, yang dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Purwakarta, akan mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan akan diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi dalam proses produksi, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Investasi dalam infrastruktur juga akan ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas terhadap pasar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik. Kemudian kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan non-pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan terus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mendukung transformasi ekonomi ke arah sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi, yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan juga difokuskan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta penguatan jaringan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk percepatan pelaksanaan strategi penanganan kemiskinan ekstrem.

Kemudian pada aspek penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal dan inovasi teknologi. Sektor pertanian akan didorong menuju pertanian modern dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan produk olahan bernilai tambah, dan perluasan akses pasar digital. Sektor pariwisata akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata unggulan tematik yang mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Sektor industri kreatif akan diperkuat melalui inkubasi bisnis, pelatihan keterampilan digital, dan fasilitasi akses permodalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi akan terus ditingkatkan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah secara makro dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kab. Purwakarta, Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target 2024
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,99
2	Angka Kemiskinan	Persen	7,25
3	Angka Pengangguran	Persen	7,00
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	0,306
6	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHK	Juta Rp.	54,19

Sumber : Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai pada tahun perencanaan. Beberapa hal yang mendasari kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 318/KU.01.03.07/BPKAD tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provisi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
3. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
4. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;

5. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan anggaran daerah Kabupaten Purwakarta diarahkan pada penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung kebijakan-kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat selaras dan harmonis dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kerangka pendanaan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap asumsi/proyeksi pencapaian target pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang lebih realistis yang dapat dicapai secara optimal.

3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- e. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- g. Meningkatkan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- h. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
- j. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
- k. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan;
- l. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
- m. Mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Berikut kami sajikan tabel Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.22

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.451.297.029.258,00	2.615.297.224.652,00	2.689.952.706.922,00	74.655.482.270,00	2,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	749.285.264.555,00	761.958.601.536,00	714.963.786.340,00	-46.994.815.196,00	-6,17
4.1.01	Pajak Daerah	493.164.444.405,00	504.885.237.213,00	457.890.422.017,00	-46.994.815.196,00	-9,31
4.1.02	Retribusi Daerah	40.131.794.939,00	227.926.390.425,00	227.926.390.425,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.635.881.071,00	7.635.881.071,00	7.635.881.071,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.353.144.140,00	21.511.092.827,00	21.511.092.827,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.702.011.764.703,00	1.851.934.623.116,00	1.973.584.920.582,00	121.650.297.466,00	6,57
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.506.316.436.671,00	1.629.018.099.000,00	1.672.399.479.975,00	43.381.380.975,00	2,66
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.695.328.032,00	222.916.524.116,00	301.185.440.607,00	78.268.916.491,00	35,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

3.3. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas

anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : pro poor, pro job dan pro growth.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Pemenuhan anggaran untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
4. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
6. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
7. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
8. Pemenuhan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;

- 9. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahap dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
- 10. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
- 11. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
- 12. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;
- 13. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah;
- 14. Dukungan terhadap penyelenggaraan trantibumlinmas, pilkada serentak dan penanggulangan kebencanaan, dan lain-lain;

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah terletak pada kebutuhan belanja daerah yang harus dibayarkan guna membiayai kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2024. Secara garis besar Perubahan Kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
5	BELANJA DAERAH	2.489.589.282.385,00	2.653.589.477.779,00	2.722.204.644.583,00	68.615.166.804,00	2,59
5.1	BELANJA OPERASI	1.955.085.354.777,00	2.035.558.242.704,00	2.106.955.204.378,00	71.396.961.674,00	3,51
5.1.01	Belanja Pegawai	995.261.945.631,00	1.029.883.293.341,00	1.064.358.248.742,00	34.474.955.401,00	3,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.632.645.891,00	885.505.935.365,00	924.897.896.135,00	39.391.960.770,00	4,45
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.698.163.255,00	117.859.013.998,00	114.689.059.501,00	-3.169.954.497,00	-2,69
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.492.600.000,00	2.310.000.000,00	3.010.000.000,00	700.000.000,00	30,30
5.2	BELANJA MODAL	162.486.404.445,00	229.293.941.356,00	260.524.967.396,00	31.231.026.040,00	13,62
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.237.828.888,00	1.896.200.000,00	2.437.424.550,00	541.224.550,00	28,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.964.513.876,00	79.130.065.230,00	99.348.170.238,00	20.218.105.008,00	25,55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.631.694.266,00	60.948.438.384,00	70.931.907.946,00	9.983.469.562,00	16,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.953.645.869,00	77.548.749.204,00	78.036.976.124,00	488.226.920,00	0,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.698.721.546,00	9.770.488.538,00	9.770.488.538,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.348.210.605,00	40.067.981.161,00	15.127.215.622,00	24.940.765.539,00	-62,25
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.348.210.605,00	40.067.981.161,00	15.127.215.622,00	-24.940.765.539,00	-62,25

KODE REKENING	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
5.4	BELANJA TRANSFER	348.669.312.558,00	348.669.312.558,00	339.597.257.187,00	-9.072.055.371,00	-2,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	44.927.822.558,00	44.927.822.558,00	35.855.767.187,00	-9.072.055.371,00	-20,19
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.741.490.000,00	303.741.490.000,00	303.741.490.000,00	0,00	0,00
Total Surplus/(Defisit)		-38.292.253.127,00	-38.292.253.127,00	-32.251.937.661,00	6.040.315.466,00	-15,77

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2023, yakni perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Adapun kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	38.292.253.127,00	38.292.253.127,00	32.251.937.661,00	-6.040.315.466,00	-15,77
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.292.253.127,00	43.292.253.127,00	37.251.937.661,00	-6.040.315.466,00	-13,95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.292.253.127,00	43.292.253.127,00	37.251.937.661,00	-6.040.315.466,00	-13,95
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLpa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APBD		2.494.589.282.385,00	2.658.589.477.779,00	2.727.204.644.583,00	68.615.166.804,00	2,58

Sumber: TAPD Kab. Purwakarta. 2024 (data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. **Pembangunan SDM**, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. **Transformasi Ekonomi**, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheury industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Adapun Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdiri dari :

- 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
- 3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera;
- 4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
- 5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
- 6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
- 7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- 8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
- 9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
- 10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;

11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;
18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;
21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
23. Pembangunan Rendah Karbon;
24. Konsolidasi Demokrasi;
25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”**, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tujuan pertama RPD adalah **Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: 1). Meningkatnya akses dan mutu pendidikan; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3). Meningkatnya standar hidup layak masyarakat; 4). Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, dan 5). Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan kedua RPD adalah **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**. Tujuan tersebut memiliki 7 (tujuh) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2). Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3). Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif; 4). Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 5). Terkendalinya tingkat kemiskinan; 6). Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja; dan 7). Meningkatnya ketahanan pangan daerah;.

Tujuan ketiga RPD adalah **Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu 1). Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan dan 3). Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah

Tujuan keempat RPD atau yang terakhir adalah **Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokraasi yang didukung oleh Inovasi Daerah**. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 2). Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan 3). Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata.
2. Refotmasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama.
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	7	10
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"						
I.		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah					
I.1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing				
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	7
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22
I.1.1				Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan			
					Indek Pembangunan Manusia	Poin	72,99
					Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,23
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85
					Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	60
I.1.2				Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat			
					Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	7
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,22
					Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06
II.		Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup					
II.1			Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
					Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01
II.1.1				Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana			
					Angka Harapan Hidup	Tahun	72,01
					Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,5
II.2			Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	67,49
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,48
II.2.1				Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	67,49
II.2.2				Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana			
					Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,48
					Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang
III.		Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal					
III.1			Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat				
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8
					Inflasi	Persen	1,34
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	82,77
III.1.1				Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah			
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8
					Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,7
					Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	7	10
III.1.2				Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian			
					Inflasi	Persen	1,34
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	82,77
					Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	56,08
					Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	93,32
III.1.3				Sasaran 8 : Meningkatkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat			
					Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,23
III.1.4				Sasaran 9 : Meningkatkan Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan			
					Nilai Tukar Petani	Poin	101,71
					Skor Pola Pangan Harapan	Poin	95,7
					Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,39
III.2			Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				
					Angka Kemiskinan	Persen	7,25
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64
III.2.1				Sasaran 10 : Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan			
					Angka Kemiskinan	Persen	7,25
					Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,306
					Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,64
III.2.2				Sasaran 11 : Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,38
					Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	79,92
IV.		Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah					
IV.1			Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah				
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100
IV.1.1				Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah			
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85
					Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	81
IV.1.2				Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien			
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100
					Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	89
					Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,6

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	7	10
V.		Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat					
V.1			Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel				
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
V.1.1				Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE			
					Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	69,64
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41
					Indeks SPBE	Poin	2,6
V.1.2				Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
					Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sangat Rendah
					Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik
					Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5
					Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
					Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,228
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,45
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,62
V.2			Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai				
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77,95
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju
V.2.1				Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
					Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju
V.2.2				Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat			
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	77,95
JUMLAH	1	5	8	17	70	70	70

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026,
BA Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.

- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
- 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

- 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu:
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Gambar 4.1



Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

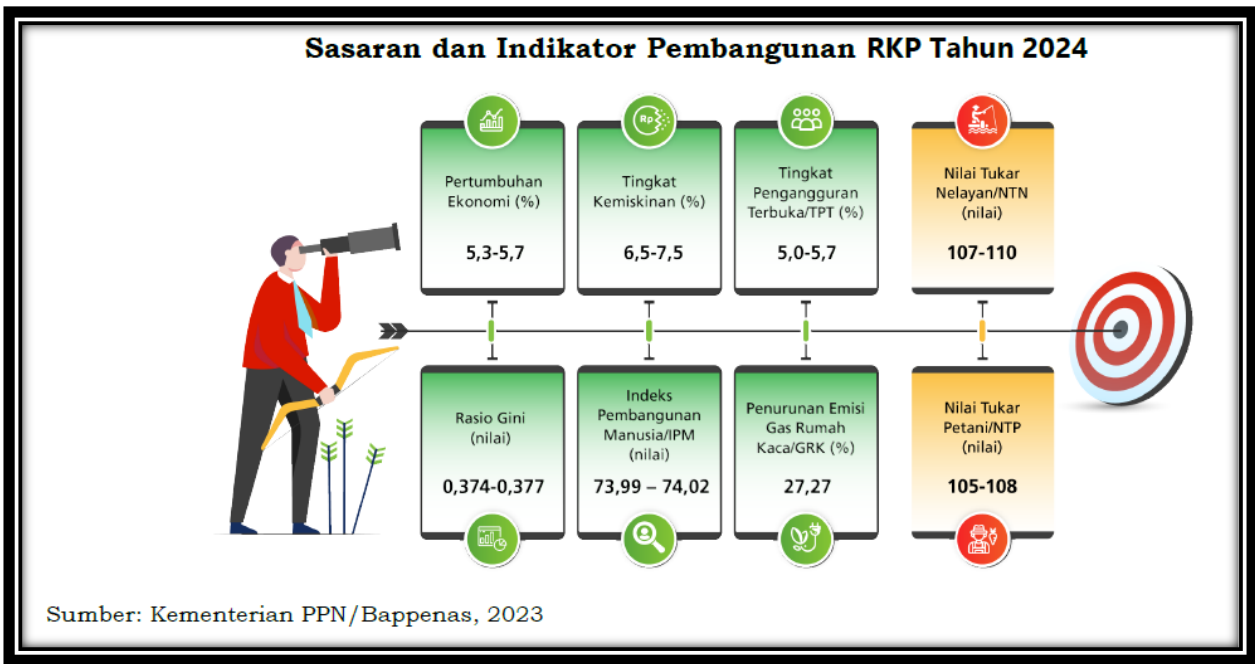
Adapun Arah Kebijakan Nasional dan Target Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 4.2



Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

Gambar 4.3



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Sumber : Permen PPN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah :

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

“MELANJUTKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT”

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata.
2. Refotmasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama.
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 merupakan tindaklanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

” MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan pokok yang masing – masing dijabarkan menjadi 100 arah kebijakan. Kemudian arah kebijakan pokok tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya.

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/ kesetaraan dan PAUD
2. Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
5. Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
6. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
8. Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
9. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja

10. Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
11. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
12. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
13. Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB

1. Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
2. Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC
3. Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
6. Menerapkan rencana pengendalian penduduk
7. Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
8. Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
2. Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
3. Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
5. Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
6. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
7. Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan

8. Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
9. Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
3. Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
4. Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
5. Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
6. Menyediakan Sistem Data Base UMKM
7. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
8. Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
9. Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang refresentatif dan strategis
10. Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
11. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
13. Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
14. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
15. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar
16. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata
17. Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan

18. Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
19. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI
20. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
21. Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
22. Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
23. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
24. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
25. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
26. Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
4. Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
5. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak

6. Peningkatan Infrastruktur Daerah

1. Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
2. Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat

3. Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
5. Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
7. Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
8. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
9. Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
10. Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

7. Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
3. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
6. Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
7. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
8. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
10. Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri

11. Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital
12. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan
13. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
14. Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
15. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
16. Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
19. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
20. Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
21. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
2. Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
4. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
5. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/prasarana bidang Kesehatan dan KB
3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi
5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata
6. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak

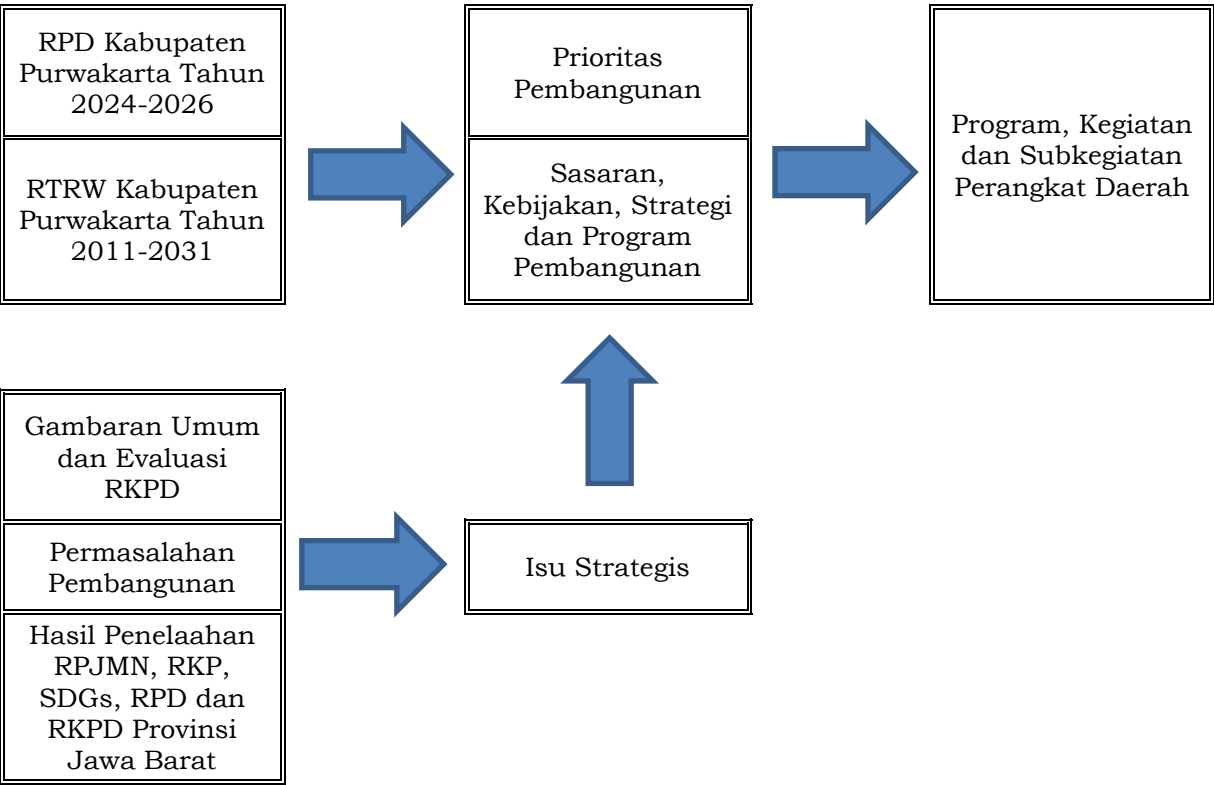
Dalam merespon permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka berdasarkan tema pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, Prioritas Pembangunan daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, Tahun 2024

Dalam penyusunan dokumen RKPD telah memperhatikan poin-poin ringkasan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kab. Purwakarta yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan
Kab. Purwakarta Tahun 2024

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2
a. Pokir : Perbaikan Jalan Kabupaten b. Pokir : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan/Perkotaan c. Pokir : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni d. Pokir : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Penunjang Hunian (Jalan Lingkungan Perkotaan, Jalan Lingkungan Sekolah, Drainase, TPT, Sanitasi)	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah

Penyusunan dokumen RKPD juga telah memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan antar dokumen perencanaan baik pada tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
5. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
	11. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.5

Keselaran Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera;	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;	11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa;	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
23. Pembangunan Rendah Karbon;	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24. Konsolidasi Demokrasi;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;	-
26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.6

Keselarasan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
9. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
10. Terkendalinya tingkat kemiskinan	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
11. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan

SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026	SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026
1	2
13. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
16. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat
17. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
19. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
20. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

Tabel 4.7

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kab. Purwakarta dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
	5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
	8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Tabel 4.8

Keselarasan Arah Kebijakan dan Indikator Sasaran RKP Nasional dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%; b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	a. Angka Kemiskinan; 7,25 Persen b. Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan; 0,306 Poin c. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta); 12,636 Rp.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%; b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk; c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota; d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota; e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 c) Sains 402.	1. Peningkatan Kualitas SDM	a. Indek Pembangunan Manusia; 72,99 Poin b. Rata-Rata Lama Sekolah; 9,23 Tahun c. Angka Harapan Lama Sekolah; 13,85 Tahun d. Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan; 60 Persen
		2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	a. Angka Harapan Hidup; 72,01 Tahun b. Laju pertumbuhan penduduk (LPP); 1,5 Persen
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%; b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	a. Inflasi; 1,34 Persen b. Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta); 82,771 Rp. c. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun); 56,08 Rp. d. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun); 93,32 Rp.
4. Penguatan Daya Saing Usaha	a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%; b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.		
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%; b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota; 67,49 Poin

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/75%/65%; b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman; c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%; d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman; e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi; f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.	6. Peningkatan Infrastruktur Daerah	a. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota; 85 Persen b. Cakupan Layanan Air Bersih; 81 Persen c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas d. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota; 100 Persen e. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik; 89 Persen f. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik; 37,6 Persen
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%; b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%; c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.	-	-
8. Pelaksanaan Pemilu 2024	a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.	8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	a. Indeks Desa Membangun; Maju Predikat b. Indeks Kerukunan Umat Beragama; 77,95 Persen
-	-	7. Reformasi Birokrasi	a. Nilai SAKIP Kabupaten; 69,64 Poin b. Indeks Kepuasan Masyarakat; Baik Predikat c. Indeks Reformasi Birokrasi; 67,41 Poin

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PURWAKARTA	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
			d. Indeks SPBE; 2,6 Poin e. Indeks Profesionalitas ASN; Sangat Rendah Predikat f. Sistem Merit Kabupaten; Baik Predikat g. Nilai LPPD Kabupaten; 3,5 Poin h. Opini BPK terhadap laporan keuangan; WTP Opini i. Indeks Kemandirian Fiskal; 0,228 Poin j. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; 82,45 Poin k. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3 Level l. Indeks Inovasi Daerah; 50,62 Nilai

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Tabel 4.9

Keselarasan Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024

NO.	INDIKATOR SASARAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN DAERAH
1	2	3
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional (%)	-
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan
3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Skor Pola Pangan Harapan
4	Rasio kewirausahaan nasional (%)	Pertumbuhan UMKM
5	Pertumbuhan PDB pertanian (%)d)	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
6	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)
7	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1)a) (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
8	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1)a) (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
9	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))a) (miliar US\$)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
10	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)a) (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

NO.	INDIKATOR SASARAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN DAERAH
1	2	3
11	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)c)	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran
12	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)
13	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
14	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
15	Tingkat inflasi umum (%)	Inflasi
16	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1)a) (%)	Indeks Kemandirian Fiskal
17	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)	Pertumbuhan Ekonomi
18	IPM KTI (nilai min-maks)	Indek Pembangunan Manusia
19	Persentase penduduk miskin KTI (%)	Angka Kemiskinan
20	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	Pertumbuhan Ekonomi
21	IPM KBI (nilai min-maks)	Indek Pembangunan Manusia
22	Persentase penduduk miskin KBI (%)	Angka Kemiskinan
23	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
24	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
25	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%): a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
26	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	Angka Kemiskinan
27	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup
28	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup
29	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Angka Harapan Hidup
30	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Angka Harapan Hidup
31	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Angka Harapan Hidup
32	Insidensi <i>tuberkulosis</i> (per 100.000 penduduk)	Angka Harapan Hidup
33	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup
34	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup
35	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup
36	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup

NO.	INDIKATOR SASARAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN DAERAH
1	2	3
37	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Indek Pembangunan Manusia
38	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah
39	Harapan lama sekolah (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah
40	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
41	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
42	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase Pemuda Berprestasi
43	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan
44	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
45	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
46	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT): a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500	Indek Pembangunan Manusia
47	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	Indeks Inovasi Daerah
48	Peringkat pada Olympic Games	Persentase Pemuda Berprestasi
49	Peringkat pada Paralympic Games	Persentase Pemuda Berprestasi
50	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
51	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
52	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
53	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	Indeks Desa Membangun
54	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
55	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	Indek Pembangunan Manusia
56	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
57	Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indek Pembangunan Manusia
58	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
59	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
60	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
61	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	Cakupan Layanan Air Bersih
62	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
63	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (%)	-
64	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	-
65	Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	-

NO.	INDIKATOR SASARAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN DAERAH
1	2	3
66	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	-
67	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
68	Rasio elektrifikasi (%)	-
69	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	-
70	Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
71	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	-
72	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
73	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
74	Persentase penurunan emisi GRK (%) : a. Kumulatif b. Tahunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
75	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
76	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)1) (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
77	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat
78	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional3) (nilai)	-
79	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi
80	Indeks Pelayanan Publik (nilai)4)	Indeks Kepuasan Masyarakat
81	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)5)	-

Sumber : Hasil Analisa Bappelitbangda, 2024

Guna mendukung pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat dan terjangkau, maka diperlukan terobosan atau inovasi daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan modern sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah. Adapun terobosan atau inovasi daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.10

Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
1.	Mitra TB (Tim jejaring layanan Tuberkolosis dengan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta)	Dinas Kesehatan	2021
2.	Mas Bunting (Optimalisasi kelas ibu untuk turunkan stunting)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Purwakarta)	2021
3.	Keju Cedar (Kader Juara, Cerdas,Aktif dan Responsif)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukatani)	2021
4.	Bale Sauyunan (Integrasi berbagai kegiatan dalam satu wadah)	Dinas Kesehatan	2022
5.	Kebon Ambu (Kawasan percontohan pertanian terpadu untuk para penyuluh pertanian dan kelompok petani dengan edukasi dan agrowisata)	Dinas Pangan dan Pertanian	2021
6.	Sadapur (Satu Data Purwakarta)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2021
7.	Mepeling Mepende Ceu Ati (Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	2021
8.	Simdag (Sistem Informasi Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	2022
9.	Edacil (Edukasi Pemadam Cilik)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2021
10.	RedKar (Relawan Pemadam Kebakaran)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2022
11.	Website BPBD Purwakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2022
12.	Cekatan (Cek Kesehatan Ternak dan Hewan)	Dinas Perikanan dan Peternakan	2022
13.	Sikasep (Sistem Informasi Kepemudaan yang Aktual, Sinergis, Edukatif dan Produktif)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
14.	Dimata (Digital Market Purwakarta)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
15.	Digital Signage (Media informasi dan promosi destinasi wisata melalui online)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
16.	Idola (Informasi dokumen lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup	2023
17.	Si Saham (Sistem Informasi Suara Hati Masyarakat/e-Pokir)	Sekretariat DPRD	2022

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
18.	Gerakan Ambu (Gerakan Anak Membaca Buku)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
19.	Galendo (Gerakan Literasi Masyarakat Peduli Naskah Kuno)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
20.	Lipperpul (Lima Program Perpustakaan unggulan)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
21.	Siceupol (Sistem Informasi Cek PBB Online)	Badan Pendapatan Daerah	2022
22.	Disepedah (Dashboard Informasi Seputar Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2022
23.	E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)	Badan Pendapatan Daerah	2022
24.	Madukara (Manajemen Pelayanan Terpadu Purwakarta Istimewa)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
25.	Silapak Prestasi (Pelayanan Proaktif Promosi Investasi dan Inovasi Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
26.	Japati Bodas (Jasa antar cepat izin, bebas ongkir dan aman sampai tujuan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
27.	Gerakan "Ulin Ka Mal" (Urus Langsung Izin & Non Izin Ka Mal Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
28.	Gardu Pasti (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
29.	Gerei Pelayanan Publik Teras Madukara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
30.	Hallo Pehape Online (Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan melalui Pengaduan Online dan Call Center)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2021
31.	Si Pelaku (Sistem Pelaporan Keuangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022
32.	Siyansos (Sistem Informasi Pelayanan Sosial)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022
33.	Gempungan Ngariung di buruan urang lembur	Sekretaris Daerah	2022
34.	Ambu Keren (Sistem Aplikasi untuk mempermudah pelayanan dan edukasi kepada calon akseptor mengenai informasi keluarga berencana, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2021
35.	Sipila (Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
36.	Silpy (Sistem Informasi Loker)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
37.	Sikepo (Sebarikan Informasi Kependudukan Online)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
38.	DC Prokila (Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
39.	Ceria (Cetak Rekam KIA di Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2021
40.	Disdukcapil Goes To School (Perekaman KTP El)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
41.	Sijempol (Perekaman KTP el bagi sakit, lansia, ODGJ dan disabilitas)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2021
42.	Lampu Umat (Pelayanan Jemput Bola di Hari Jum'at)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
43.	PERKIMSERU (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman dan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2022

Sumber : Keputusan Bupati Purwakarta No. 050/Kep.431-Bappelitbangda/ 2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Penerapan 2021, 2022 dan 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan dalam Bab V ini hanya memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 18 (Delapan Belas) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;

18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan Perikanan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) Unsur yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Unsur yang meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penelitian dan Pengembangan;
6. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Inspektorat;

Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kecamatan;

Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, telah mengakomodir kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada semua Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan bidang urusan pemerintahan yang diampunya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan program-program pembangunan untuk melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 terdiri dari :

A. PROGRAM PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN

Program Teknis Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2. DINAS KESEHATAN

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. RSUD BAYU ASIH

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung
- 4) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Teknis Urusan Pertanahan

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 3) Program Pengelolaan Tanah Kosong

5. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengembangan Permukiman

Program Teknis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penanggulangan Bencana

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Program Teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Teknis Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

10. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Program Teknis Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Program Teknis Urusan Transmigrasi

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Program Teknis Urusan Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Teknis Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan Persampahan

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Teknis Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Teknis Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

16. DINAS PERHUBUNGAN

Program Teknis Urusan Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Teknis Urusan Komunikasi Dan Informatika

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Aplikasi Informatika

Program Teknis Urusan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Teknis Urusan Persandian

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Program Teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6) Program Pengembangan UMKM

Program Teknis Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Teknis Urusan Perindustrian

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Teknis Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

20. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Program Teknis Urusan Kepemudaan, dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Teknis Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program Teknis Urusan Pariwisata

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program Teknis Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Teknis Urusan Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

22. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Program Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 2) Program Penyuluhan Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

23. SEKRETARIAT DAERAH

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Pengelolaan Perbatasan

- 1) Program Pengelolaan Perbatasan

24. SEKRETARIAT DPRD

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat DPRD

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

26. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

27. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program Teknis Urusan Kepegawaian

- 1) Program Kepegawaian Daerah

Program Teknis Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

29. INSPEKTORAT

Program Teknis Unsur Pengawas

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

30. KECAMATAN JATILUHUR

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

31. KECAMATAN SUKASARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

32. KECAMATAN MANIIS

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

33. KECAMATAN TEGALWARU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

34. KECAMATAN PLERED

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

35. KECAMATAN SUKATANI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

36. KECAMATAN DARANGDAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

37. KECAMATAN BOJONG

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

38. KECAMATAN WANAYASA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

39. KECAMATAN KIARAPEDES

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

40. KECAMATAN PASAWAHAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

41. KECAMATAN PONDOKSALAM

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

42. KECAMATAN PURWAKARTA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

43. KECAMATAN BABAKANCIKAO

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

44. KECAMATAN CAMPAKA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

45. KECAMATAN CIBATU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

46. KECAMATAN BUNGURSARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

47. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Teknis Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selengkapnya mengenai Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				PERUBAHAN RKPD 2024				SELISIH RKPD - PERUBAHAN RKPD 2024			
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan	6	18	106	679.159.956.234	6	18	117	695.386.981.859	6	18	122	739.104.181.782	0	0	16	59.944.225.548
2	Dinas Kesehatan	5	23	110	207.133.828.294	5	25	115	210.854.818.328	5	25	115	248.629.073.189	0	2	5	41.495.244.895
3	Rumah Sakit Bayu Asih	4	16	57	209.374.458.648	4	16	57	204.061.620.297	4	16	57	210.617.192.829	0	0	0	1.242.734.181
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	24	110	196.926.512.236	11	24	117	174.465.176.236	11	24	118	170.765.176.236	0	0	8	-26.161.336.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	16	77	80.164.774.892	8	16	77	88.582.728.892	8	16	77	107.160.618.613	0	0	0	26.995.843.721
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	57	20.165.673.187	2	10	53	22.946.468.066	2	10	53	22.810.298.930	0	0	-4	2.644.625.743
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	70	6.223.973.206	2	12	78	6.268.138.206	2	12	78	6.994.821.534	0	0	8	770.848.328
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	13	76	15.186.494.622	2	13	76	16.553.950.844	2	13	76	17.029.030.163	0	0	0	1.842.535.541
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	29	80	10.456.274.986	13	29	80	11.431.774.351	13	29	81	11.274.061.049	0	0	1	817.786.063
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	7	20	53	12.696.905.340	7	20	53	13.467.095.611	7	20	53	12.973.758.479	0	0	0	276.853.139
11	Dinas Pangan dan Pertanian	10	21	77	21.410.467.828	10	21	77	28.237.193.717	10	21	78	27.619.352.279	0	0	1	6.208.884.451
12	Dinas Lingkungan Hidup	11	24	80	40.580.305.302	11	24	80	44.195.953.321	11	24	80	44.121.842.486	0	0	0	3.541.537.184
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	29	18.422.960.689	5	14	29	18.347.960.689	5	15	31	19.577.819.457	0	1	2	1.154.858.768
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	67	21.659.426.756	5	12	67	20.292.519.871	5	12	67	22.050.800.995	0	0	0	391.374.239
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	15	45	22.655.262.469	4	15	45	23.266.501.469	4	15	45	22.153.108.231	0	0	0	-502.154.238
16	Dinas Perhubungan	3	21	73	21.908.385.684	3	21	74	43.062.873.684	3	21	75	47.729.534.447	0	0	2	25.821.148.763
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	83	27.385.482.106	5	14	76	26.849.232.106	5	14	76	30.292.029.944	0	-1	-7	2.906.547.838
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	16	30	71	16.929.207.120	16	30	71	19.126.886.478	16	30	71	19.512.151.484	0	0	0	2.582.944.364
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	41	13.194.823.196	6	14	41	14.236.601.361	6	14	41	14.378.811.989	0	0	0	1.183.988.793
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	13	34	142	32.809.455.312	13	34	142	28.630.705.312	13	34	142	28.690.299.527	0	0	0	-4.119.155.785
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	16	56	11.701.069.627	5	16	56	12.134.858.286	5	16	56	12.519.071.111	0	0	0	818.001.484
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	9	29	84	16.431.289.263	9	29	82	16.771.289.263	9	29	82	15.684.333.940	0	0	-2	-746.955.323
23	Sekretariat Daerah	4	20	81	83.152.282.031	4	21	90	81.674.043.594	4	21	90	80.049.917.694	0	1	9	-3.102.364.337
24	Sekretariat DPRD	2	15	44	71.700.171.332	2	16	50	86.203.465.484	2	16	54	79.570.595.484	0	1	10	7.870.424.152
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	72	13.692.741.053	4	18	72	15.493.593.427	4	18	72	16.406.672.561	0	0	0	2.713.931.508

No	Perangkat Daerah	RKPD 2024				APBD 2024				PERUBAHAN RKPD 2024				SELISIH RKPD - PERUBAHAN RKPD 2024			
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	71	426.466.644.072	3	14	71	490.387.358.504	3	14	71	456.524.778.327	0	0	0	30.058.134.255
27	Badan Pendapatan Daerah	2	9	56	32.862.578.527	2	9	56	34.424.748.125	2	9	56	36.306.850.436	0	0	0	3.444.271.909
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	65	39.833.428.518	3	14	65	38.617.529.518	3	14	65	35.201.765.892	0	0	0	-4.631.662.626
29	Inspektorat	3	12	41	30.124.030.316	3	12	41	31.335.945.006	3	12	41	29.616.639.616	0	0	0	-507.390.700
30	Kecamatan Jatiluhur	6	16	40	3.485.424.995	6	16	40	3.577.340.893	6	16	40	3.577.340.893	0	0	0	91.915.898
31	Kecamatan Sukasari	6	16	49	3.236.466.067	6	16	49	3.441.332.071	6	16	49	3.457.935.789	0	0	0	221.469.722
32	Kecamatan Maniis	6	15	37	2.987.507.138	6	15	37	3.218.289.234	6	15	38	3.431.389.234	0	0	1	443.882.096
33	Kecamatan Tegalwaru	6	15	36	3.485.424.995	6	15	36	3.565.987.728	6	15	36	3.353.987.728	0	0	0	-131.437.267
34	Kecamatan Plered	6	15	37	3.485.424.995	6	15	37	3.682.188.442	6	15	39	3.805.578.442	0	0	2	320.153.447
35	Kecamatan Sukatani	6	14	34	3.983.342.851	6	14	34	4.128.546.775	6	14	34	3.933.546.775	0	0	0	-49.796.076
36	Kecamatan Darangdan	6	15	35	3.734.383.923	6	15	35	4.296.132.999	6	15	35	4.354.038.999	0	0	0	619.655.076
37	Kecamatan Bojong	6	14	37	3.734.383.923	6	14	37	4.260.383.744	6	14	37	4.170.383.744	0	0	0	435.999.821
38	Kecamatan Wanayasa	6	14	39	3.734.383.923	6	14	39	4.090.618.856	6	14	39	4.090.618.856	0	0	0	356.234.933
39	Kecamatan Kiarapedes	6	11	23	3.485.424.995	6	11	23	3.682.603.115	6	11	23	3.682.603.115	0	0	0	197.178.120
40	Kecamatan Pasawahan	3	8	25	3.236.466.067	3	8	25	3.356.929.910	5	13	31	3.442.929.910	2	5	6	206.463.843
41	Kecamatan Pondoksalam	6	13	32	3.485.424.995	6	13	32	3.633.417.407	6	13	32	3.583.417.407	0	0	0	97.992.412
42	Kecamatan Purwakarta	6	15	42	22.655.262.469	6	15	42	25.286.317.287	6	15	42	25.569.021.962	0	0	0	2.913.759.493
43	Kecamatan Babakancikao	6	12	35	3.236.466.067	6	12	35	3.405.497.915	6	12	35	3.562.028.324	0	0	0	325.562.257
44	Kecamatan Campaka	6	14	34	3.485.424.995	6	14	34	3.573.750.107	6	14	34	3.573.750.107	0	0	0	88.325.112
45	Kecamatan Cibatu	6	12	32	3.983.342.851	6	13	33	4.084.182.803	6	14	34	4.321.287.803	0	2	2	337.944.952
46	Kecamatan Bungursari	6	14	31	3.236.466.067	6	14	31	3.418.969.154	6	14	31	3.548.969.154	0	0	0	312.503.087
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	44	10.509.398.223	6	13	44	51.578.977.434	6	13	44	51.381.227.637	0	0	0	40.871.829.414
JUMLAH		278	774	2.716	2.489.589.282.385	278	778	2.751	2.653.589.477.779	280	785	2.776	2.722.204.644.583	2	11	60	232.615.362.198

Sumber : <https://purwakartakab.sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Selanjutnya mengenai Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat Program Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diakses melalui tautan “ <https://tinyurl.com/bab-v-perubahan-rkpd-pwk-2024> “

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peraturan perundang-undangan baik dari pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dan harus diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan juga dalam rangka penyesuaian kemampuan riil keuangan daerah berdasarkan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024 dan proyeksi potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2024, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan target pembangunan daerah tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2024 juga digunakan sebagai rujukan dan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat yang sejahtera.

Semoga rencana pembangunan daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

PJ. BUPATI PURWAKARTA



[Handwritten signature]

BENNY IRWAN



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari

32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

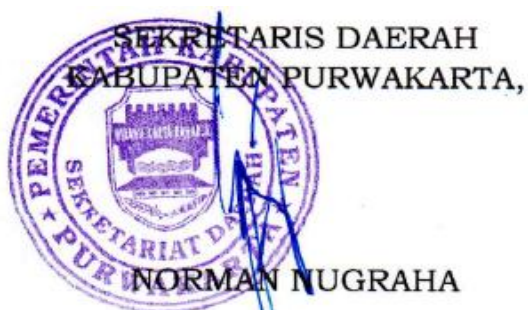
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024



NORMAN NUGRAHA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BABAKANCIKAO								3.236.466.067,00	3.405.497.915,00	3.562.028.324,00	325.562.257,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.236.466.067,00	3.405.497.915,00	3.562.028.324,00	325.562.257,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							3.236.466.067,00	3.405.497.915,00	3.562.028.324,00	325.562.257,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.151.551.305,00	3.156.497.915,00	3.313.028.324,00	-3.151.551.305,00							0,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	16.000.000,00	15.868.100,00	15.868.100,00	-131.900,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4.000.000,00	3.948.500,00	3.948.500,00	-51.500,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-20.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-20.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-20.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-20.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.000.000,00	3.999.600,00	3.999.600,00	-400,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	2.717.565.105,00	2.666.924.889,00	2.699.165.698,00	-18.399.407,00			-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19.00 Oran g/bulan	19.00 Oran g/bulan	2.710.565.105,00	2.660.023.989,00	2.692.264.798,00	-18.300.307,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA PERIMBANGAN	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.000.000,00	3.920.900,00	3.920.900,00	-79.100,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	3.000.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	-20.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN Dan Kompetensi ASN				-	100 Persen	9.986.200,00	36.640.000,00	36.640.000,00	26.653.800,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	7.986.200,00	16.640.000,00	16.640.000,00	8.653.800,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.00 Orang	1.00 Orang	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	92.000.000,00	62.767.646,00	62.767.646,00	-29.232.354,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	-708.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16.00 Paket	16.00 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	68.000.000,00	39.510.646,00	39.510.646,00	-28.489.354,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	1.000.000,00	969.000,00	969.000,00	-31.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	-4.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00 Laporan	100.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kuantitas Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				-	100 Persen	21.000.000,00	20.970.000,00	42.430.300,00	21.430.300,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25.00 Unit	25.00 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	9.000.000,00	8.970.000,00	30.430.300,00	21.430.300,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	255.000.000,00	273.440.280,00	273.440.280,00	18.440.280,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	80.000.000,00	55.299.260,00	55.299.260,00	-24.700.740,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7.00 Laporan	7.00 Laporan	175.000.000,00	218.141.020,00	218.141.020,00	43.141.020,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	40.000.000,00	79.887.000,00	182.716.300,00	142.716.300,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10.00 Unit	10.00 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3.00 Unit	3.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31.00 Unit	31.00 Unit	5.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-120.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	50.007.000,00	152.836.300,00	142.836.300,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	10.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-10.000.000,00							0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Disusun				-	2 Dokumen	10.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	115.000.000,00			-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.00 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-22.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang Disusun				-	1 Laporan	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.00 Lembaga K emasyarak atan	5.00 Lembaga K emasyarak atan	17.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Disusun	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum Yang Disusun				-	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	34.914.762,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-34.914.762,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan				-	6 Kegiatan	34.914.762,00	80.000.000,00	80.000.000,00	45.085.238,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100.00 Orang	70 Orang	34.914.762,00	80.000.000,00	80.000.000,00	45.085.238,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun				-	1 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				100.00 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Purwakarta, Babakancikao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABAKANCIKAO
			J U M L A H						3.236.466.067,00	3.405.497.915,00	3.562.028.324,00	325.562.257,00							0,00	